

**STRATEGI “*BALANCE OF THREAT*” AMERIKA SERIKAT TERHADAP
ANCAMAN TIONGKOK DI KAWASAN INDO-PASIFIK MELALUI PAKTA
KEAMANAN ‘AUKUS’**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu
Hubungan Internasional*

Oleh:

CHANTIKA SALSABILA ALARSAH

E061191110

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : STRATEGI "BALANCE OF THREAT" AMERIKA SERIKAT TERHADAP ANCAMAN TIONGKOK DI KAWASAN INDO-PASIFIK MELALUI PAKTA KEAMANAN 'AUKUS'

N A M A : CHANTIKA SALSABILA ALARSAH

N I M : E061191110

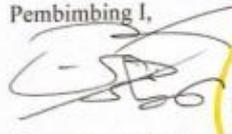
DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 22 Februari 2023

Mengetahui :

Pembimbing I,

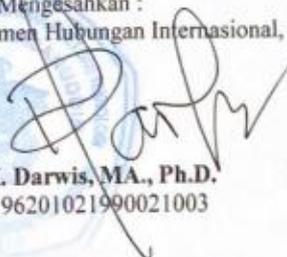

Agussalim, S.IP, MIRAP
NIP. 197608132005011003

Pembimbing II,


Nurjannah Abdullah, S.IP, MA
NIP. 198901032019032010

Mengesahkan :

Ketua Departemen Hubungan Internasional,


Prof. H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : STRATEGI "BALANCE OF THREAT" AMERIKA SERIKAT TERHADAP ANCAMAN TIONGKOK DI KAWASAN INDO-PASIFIK MELALUI PAKTA KEAMANAN 'AUKUS'

N A M A : CHANTIKA SALSABILA ALARSAH

N I M : E061191110

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 13 Februari 2023.

TIM EVALUASI

Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chantika Salsabila Alarsah

NIM : E061191110

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan sebenarnya bawah skripsi yang saya tulis ini dengan judul:

**STRATEGI “BALANCE OF THREAT” AMERIKA SERIKAT TERHADAP
ANCAMAN TIONGKOK DI KAWASAN INDO-PASIFIK MELALUI PAKTA
KEAMANAN ‘AUKUS’**

Merupakan hasil karya tulis saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya tulis orang lain maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 13 Februari 2023

Chantika Salsabila Alarsah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah, petunjuk, kekuatan, ilmu, pengetahuan, dan segala nikmat sehingga tugas akhir yang berjudul “Strategi “*Balance of Threat*” Amerika Serikat terhadap Ancaman Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik melalui Pakta Keamanan AUKUS” dapat diselesaikan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dan lulus dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan umpan balik berupa kritik dan saran yang konstruktif agar dapat menjadikan skripsi ini lebih baik dan lebih bermanfaat bagi para pembaca. Selain itu, penelitian dan pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, dengan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayah **Arief Budiman** dan Mama **Saidah Saleh**. Terima kasih telah melimpahkan kasih sayang, dukungan, perhatian, dan do'a yang tiada henti-hentinya kepada Penulis. Terima kasih telah selalu mendukung keputusan, mimpi dan cita-cita Penulis hingga Penulis dapat tumbuh menjadi individu yang bahagia dan gigih. Segala bentuk kasih sayang, perhatian, hingga pengorbanan Ayah dan Mama untuk membesarkan dan mengantar Penulis hingga sampai di titik ini tidak akan mampu terbalaskan oleh Penulis, oleh karena itu semoga Allah yang akan membalas dengan perlindungan dan limpahan rahmat-Nya kepada Ayah dan Mama. Dengan berakhirnya masa studi S1 Penulis, semoga Penulis dapat membawa kebahagiaan yang lebih besar untuk Ayah dan Mama di masa yang akan datang. *May Allah bless you two eternally.*

2. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak **Prof. H. Darwis, MA., Ph.D** yang telah banyak berjasa menjadikan Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin sebagai tempat yang berkualitas untuk menuntut ilmu. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para dosen pembimbing skripsi Penulis, Bapak **Agussalim, S.IP., MIRAP** dan Kak **Nurjannah Abdullah, S.IP., MA** yang memiliki kontribusi yang sangat besar dan sangat berjasa dalam membantu dan membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Berkat arahan dari kedua dosen pembimbing, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Bapak **Drs. Patrice Lumumba, MA**, Bapak **Alm. Drs. Aspiannor Masrie, M.Si.**, Bapak **Drs. H. Husain Abdullah, M.Si.**, Bapak **Drs. H. M. Imran Hanafi, MA., M.Ec.**, Bapak **Ishaq Rahman, S.IP., MSi.**, Ibu **Seniwati S.Sos, M.Hum, Ph.D.**, Ibu **Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si.**, Bapak **Burhanuddin, S.IP., M.Si.**, Bapak **Muhammad Nasir Badu, Ph.D.**, Bapak **Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si.**, Bapak **Dr. Adi Suryadi B, M.A.**, Kak **Ashry Sallatu, S.IP., M.Si.**, Kak **Aswin Baharuddin, S.IP., MA.**, Kak **Bama Andika Putra, S.IP., M.IR.**, Kak **Abdul Razaq Z. Cangara., S.IP., MIR.**, Kak **Biondi Sanda Sima, S.IP., M.Sc.,L.LM.**, dan Kak **Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA**. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama 3,5 tahun ini. Menempuh pendidikan S1 di Departemen ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Penulis tidak hanya mendapatkan ilmu dan pengetahuan, akan tetapi Penulis juga telah diberikan berbagai kesempatan oleh beberapa dosen untuk menjadi asisten peneliti, yang tentunya menjadi pengalaman yang sangat bermanfaat dan berharga bagi Penulis. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala manfaat akademik yang telah diberikan.

3. Staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Ibu Rahma, Pak Ridho, Pak Dayat, Kak Ita**, dan **Kak Salmi** yang telah banyak membantu Penulis, khususnya terkait pengurusan berkas dan administrasi. Semoga segala pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan dan akan dilakukan bernilai pahala, dan semoga senantiasa diberikan kemudahan.
4. Keluarga Penulis, mulai dari adik-adik tercinta, **Jelita Insani Maghfira Alarsah** dan **Tegar Atthoriq Islamy Alarsah**. Semoga masa studi Fira dan Thoriq segera selesai dengan hasil yang terbaik. Kemudian Penulis ucapkan terima kasih untuk keluarga besar Jambu dan Saleh-Saleha, terutama untuk **Om Yudi, Tante Rara, Om Punding, Bunda Ipa** yang telah berperan sebagai orang tua Penulis ketika Penulis berada jauh dari Ayah dan Mama di masa-masa penyelesaian skripsi. Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis.
5. *My person*, **A. Muhammad Fadhil Pramadiansyah**. Terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya atas segala bentuk bantuan, dukungan, doa, dan perhatian, yang telah diberikan untuk Penulis, terutama selama proses penyusunan skripsi ini. *Thank you for being my ultimate best friend, research colleague, study buddy, advisor, you name it. You have taught me a lot of things that are beyond fruitful for my well-being and I have no idea how to precisely explain how grateful I am for you.* Rasa terima kasih tentu tidak cukup untuk membalas segala kebaikan Fadhil kepada Penulis, oleh karena itu Penulis berharap semoga Allah yang akan membalas segala kebaikan tersebut dengan limpahan rahmat-Nya. Semangat untuk setiap aktivitas pasca studi S1-nya, semoga setiap yang dicita-citakan tercapai. *Just like you, I wish nothing but the best for what our future holds.*
6. **Ayah Taswin** dan **Bunda Ida** tersayang, terima kasih yang tidak terhingga atas segala kasih sayang, kebaikan, dukungan, dan do'a yang telah diberikan kepada Penulis

selama ini. Penulis mungkin tidak dapat membalas semua kebaikan yang Ayah dan Bunda telah berikan, tetapi Penulis berharap dan berdoa semoga Allah yang akan membalas dengan perlindungan dan limpahan kasih sayang-Nya kepada Ayah dan Bunda. *May Allah bless you two eternally.*

7. Para peneliti PRP-BRIN, khususnya Kak **Mario Surya Ramadhan, M.NatSecPol.** dan Kak **Pandu Prayoga, MA.** yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam meneliti selama periode magang. Bimbingan dan arahan pada akhirnya tidak hanya bermanfaat dalam penulisan artikel selama periode magang, tetapi juga sangat berkontribusi terhadap penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat tersayang, mulai dari **A. Nur Anandiyah F** dan **Dinda Salsabila.** Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada Penulis, khususnya pada saat masa penyusunan skripsi. Ucapan terima kasih yang sama Penulis tujukan untuk **Andi Rusita, Darmatasyah, Elok Dwi Wijayanti, Muhammad Naufal Al-Islami, Febri Ananda Sjakir,** dan **Isti Nurelda,** semoga semuanya sukses dan bahagia selalu.
9. Sahabat-sahabat PBL, **Nadhras Masrurah, Andi Nurkintan, Nadya Shalsabillah, Mega Soraya, Sukma Tiara, Amanda Tanra, Junisya Putri, Ramizah Aziziah Roem, Sofiyah Salsabil, As Syifa Ulchairan,** terima kasih telah menjadi sahabat-sahabat seperjuangan Penulis selama duduk di bangku perkuliahan. Walaupun selama perkuliahan sebagian besar kelas dilaksanakan secara *online*, kehidupan perkuliahan Penulis tetap sangat berkesan karena PBL. Semoga skripsiannya diberi kemudahan dan dapat lulus dengan nilai yang terbaik. *See you on top, guys.*
10. Seluruh teman-teman angkatan HI 2019 (Historia), khususnya **Muhammad Daffa Rizqillah, Muhammad Nurichsan Gazali, Adis Dwi Maghfira, Kezia Athirah Monica, Annisa Fauziah Lawi, Andi Faradilla, Ahmad Abdi, Geovanny Tirza P,**

Farhan Rahman, Indra, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat Penulis tuliskan satu per satu. Terima kasih telah menjadi teman-teman diskusi Penulis dan sudah membantu dalam hal akademik dan non-akademik lainnya. *Best of luck for your every ongoing and upcoming academic endeavors, guys.*

11. Untuk adik-adik tingkat HI 2020, **Karisma Nurul Izzah, Regina Farah, Siti Nurhaliza, Gurpeet Kaur**, dan terutama **Ahmad Raihan Darwis**, yang sudah banyak sekali membantu Penulis, khususnya dalam hal pengurusan berkas. Semoga adik-adik semua diberikan kelancaran dalam penyusunan proposal dan skripsi.
12. *Last but definitely not the least*, kakak-kakak tingkat HI 2018 (Reforma), khususnya **Mba Afni Zugito, Dhiya Rakhman, Mario Fahrevi, Hardian, Zhadela Arisafael, Latifah Ukhra Rasyid, Kak Brenda Prisyella, Naswan Nasrun H, Kak Nanda Aprilianty Syarief, Kak Nahda Nurfadilah, Kak Dewi Sukma**, yang telah menjadi teman Penulis dan telah membantu Penulis, terutama di tahun akhir perkuliahan. Semoga segala urusan pasca perkuliahan diberikan limpahan kelancaran dan kebaikan.

ABSTRAK

Chantika Salsabila Alarsah, 2019. E061191110. “STRATEGI “BALANCE OF THREAT” AMERIKA SERIKAT TERHADAP ANCAMAN TIONGKOK DI KAWASAN INDO-PASIFIK MELALUI PAKTA KEAMANAN ‘AUKUS’”. Pembimbing I: Agussalim, S. IP, MIRAP. Pembimbing II: Nurjannah Abdullah, S. IP, MA. Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana AUKUS dilancarkan sebagai bentuk “*Balance of Threat*” Amerika Serikat terhadap ancaman Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik dan juga menganalisis dampak yang telah eksis hingga potensi yang dapat terjadi ke depannya terhadap dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik akibat kehadiran AUKUS di kawasan tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori “*Balance of Threat*” untuk mengidentifikasi motif pembentukan AUKUS oleh Amerika Serikat dan teori “*Regional Security Complex*” untuk menganalisis dampak dari pembentukan AUKUS tersebut dengan menggunakan tingkat analisis domestik dan regional. Tingkat analisis domestik akan menganalisis dampak AUKUS terhadap kebijakan keamanan Tiongkok, kemudian tingkat analisis regional akan menganalisis dampak AUKUS terhadap dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa motif Amerika Serikat melakukan penyeimbangan terhadap Tiongkok tidak hanya disebabkan oleh kekuatan Tiongkok yang meningkat, akan tetapi bagaimana kekuatan tersebut ditunjukkan melalui tindakan agresif yang mengancam keamanan nasional AS dan sekutunya. Ancaman tersebut mencakup aspek kekuatan agregat, kekuatan ofensif, intensi agresif, hingga kedekatan geografis. Akibat adanya ancaman tersebut, Amerika Serikat membentuk pakta keamanan trilateral ‘AUKUS’ bersama dengan Australia dan Inggris untuk merespon peningkatan ancaman Tiongkok, khususnya di Indo-Pasifik. Penelitian ini juga menemukan untuk saat ini dampak AUKUS terhadap dinamika kawasan Indo-Pasifik belum dapat diidentifikasi, sebagaimana pembentukan AUKUS masih baru. Akan tetapi, pembentukan AUKUS ini telah membawa pengaruh terhadap peningkatan kapabilitas militer Tiongkok, yang nantinya peningkatan kapabilitas tersebut berpotensi untuk mempengaruhi peningkatan kapabilitas militer negara-negara Indo-Pasifik lainnya di masa yang akan datang, menjadikan kompleks keamanan kawasan di Indo-Pasifik terbentuk.

Kata Kunci: AUKUS, *Balance of Threat*, Amerika Serikat, Tiongkok, Indo-Pasifik, Ancaman

ABSTRACT

Chantika Salsabila Alarsah, 2019. E061191110. "THE UNITED STATES "BALANCE OF THREAT" STRATEGY AGAINST CHINA THREATS IN THE INDO-PACIFIC REGION THROUGH THE 'AUKUS' SECURITY PACT". Advisor I: Agussalim, S. IP, MIRAP. Advisor II: Nurjannah Abdullah, S. IP, MA. Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This research aims to analyze how AUKUS was launched as a form of the United States' "Balance of Threat" against Chinese threats in the Indo-Pacific region and also analyze the impact that has existed to the potential that could occur in the future on the security dynamics of the Indo-Pacific region due to the presence of AUKUS in the area.

This study utilizes the "Balance of Threat" theory to identify the motives for the formation of AUKUS by the United States and the "Regional Security Complex" theory to analyze the impact of the formation of AUKUS using domestic and regional levels of analysis. The domestic analysis level will analyze the impact of AUKUS on China's security policies, then the regional analysis level will analyze the impact of AUKUS on the security dynamics of the Indo-Pacific region.

The results of this study indicate that the United States' motive for balancing against China is not only due to China's increasing power, but also how the power is demonstrated through aggressive actions that threaten the national security of the US and its allies. These threats include aggregate power, offensive power, aggressive intentions, and geographical proximity. As a result of these threats, the United States formed the 'AUKUS' trilateral security pact together with Australia and the United Kingdom in response to China's increasing threats, especially in the Indo-Pacific. This study also found that currently the impact of AUKUS on the dynamics of the Indo-Pacific region cannot be identified, as the formation of AUKUS is still new. However, the formation of AUKUS has impacted China's military capabilities, which in turn has the potential to influence the enhancement of military capabilities of other Indo-Pacific countries in the future, generating a regional security complex in the Indo-Pacific being formed.

Keywords: AUKUS, Balance of Threat, United States of America, China, Indo-Pacific, Threats

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
D. Kerangka Konseptual.....	17
1. Konsep <i>Balancing (Balance of Threat)</i>	18
2. Konsep <i>Regional Security Complex</i>	22
E. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Teknik Pengumpulan Data	26
3. Teknik Analisis Data.....	26
4. Tahapan Penelitian	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. <i>Balance of Threat</i>	28
B. <i>Regional Security Complex</i>	37
C. Penelitian Terdahulu	43
BAB III GAMBARAN UMUM	49
A. Ancaman Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik.....	49
1. Kekuatan Agregat.....	49
2. Kekuatan Ofensif	52
3. Intensi Agresif	57
4. Kedekatan Geografis	60

B. Kebijakan Amerika Serikat di Indo-Pasifik.....	63
BAB IV PEMBAHASAN.....	74
A. Analisis AUKUS sebagai Strategi <i>Balance of Threat</i> Amerika Serikat terhadap Ancaman Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik.....	74
1. AUKUS sebagai Strategi <i>Balancing</i> terhadap Ancaman Kekuatan Ofensif Tiongkok.....	81
2. AUKUS sebagai Strategi <i>Balancing</i> terhadap Ancaman Kedekatan Geografis Tiongkok.....	85
B. Dampak AUKUS terhadap Dinamika Keamanan Kawasan Indo-Pasifik.....	89
1. Dampak AUKUS terhadap Kebijakan Keamanan Tiongkok	89
2. Dampak AUKUS terhadap Dinamika Keamanan Kawasan Indo-Pasifik	99
BAB V PENUTUP	112
Daftar Pustaka	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Indo-Pasifik (Interpretasi Geografis dari berbagai Aktor)	1
Gambar 1.2 Perbandingan Peta Eleven-dash line dan Nine-dash line Tiongkok.....	6
Gambar 3.1 Perkiraan Pengeluaran Militer Tiongkok 1990-2021.....	50
Gambar 3.2 Jangkauan Rudal Balistik Nuklir Tiongkok	54
Gambar 3.3 Peta Kawasan Indo-Pasifik dan Asia-Pasifik - Peta Ilustratif	67
Gambar 4.1 Ilustrasi Lintasan Roket dengan sistem FOBS.....	84
Gambar 4.2 Timeline Agenda AUKUS	87

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jarak beberapa Pangkalan Militer AS dengan Wilayah Terdekat Tiongkok	61
Tabel 3.2 Perbandingan Pendekatan Tiga Presiden Terakhir AS di Kawasan Indo-Pasifik	65
Tabel 4.1 Pengeluaran Militer Tiongkok Lima Tahun Terakhir (2018-2022).....	92
Tabel 4.2 Perbandingan Anggaran Militer Kekuatan Besar Indo-Pasifik Tahun 2017-2021 (Pra-AUKUS).....	102

DAFTAR BAGAN

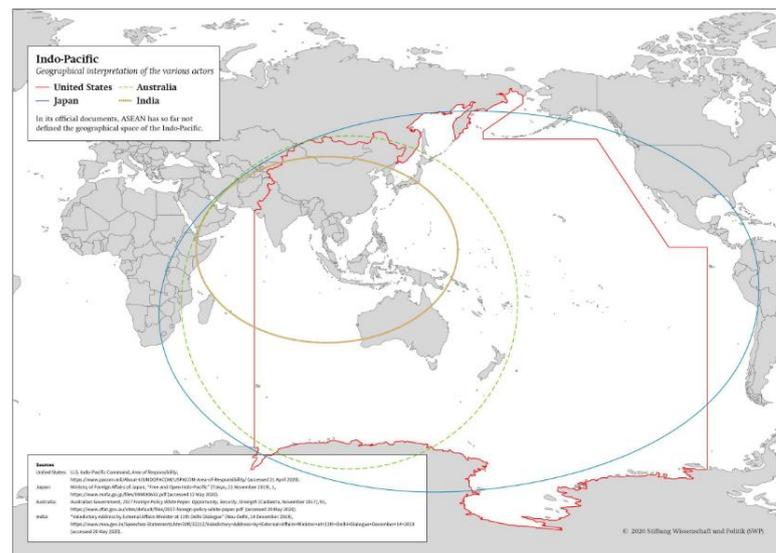
Bagan 1.1 Kerangka Konseptual.....	17
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan Indo-Pasifik dapat dikatakan sebagai kawasan yang paling krusial di dunia dengan luasnya dinamika politik, keamanan dan ekonomi yang dimilikinya. Tatanan ekonomi internasional, masalah keamanan yang kompleks, sengketa wilayah, proliferasi nuklir, hingga isu lingkungan menyelimuti kawasan ini. Dalam pemetaannya, beberapa negara memiliki interpretasi yang berbeda beda mengenai hamparan kawasan Indo-Pasifik.



Gambar 1.1 Peta Indo-Pasifik (Interpretasi Geografis dari berbagai Aktor)

Sumber: (SWP German, 2020)

Jepang, India, dan Australia melihat kawasan Indo-Pasifik terbentang dari timur Afrika hingga ke Samudera Pasifik. Sedangkan Amerika Serikat melihat jangkauan Asia-Pasifik ditarik dari pantai Barat India hingga ke Samudera Pasifik. Walaupun berbagai aktor memiliki interpretasi geografis yang berbeda-beda atas kawasan Indo-Pasifik, secara geospasial Indo-Pasifik dapat dipahami sebagai kawasan yang

menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kebutuhan negara-negara di dunia akan kedua samudera ini sangat besar terutama pada aspek politik dan ekonomi. Ketergantungan tersebut merupakan hasil dari perkembangan globalisasi yang menstimulasi perkembangan mobilitas lintas samudera, perdagangan antar aktor-aktor internasional, dan lain sebagainya (Das, 2019).

Perlu diketahui bahwa kawasan Indo-Pasifik begitu penting karena kawasan tersebut adalah rumah bagi 5 negara dengan populasi terbanyak (Tiongkok, Amerika Serikat, India, Indonesia, Pakistan), menampung lebih dari setengah total populasi di dunia. Kawasan ini juga memegang dua-pertiga total perekonomian global, tujuh militer terbesar di dunia (Indo-Pacific Strategy of the United States, 2022), dan rute-rute laut yang menjadi salah satu *choke-point* paling strategis seperti Selat Malaka, Selat Palk, Selat Sunda, dan Selat Korea. Selain itu, kawasan Indo-Pasifik, khususnya di Laut Cina Selatan, kaya akan SDA, seperti gas dan minyak bumi (Daiss, 2016).

Amerika Serikat (AS) telah menjadi hegemon global sejak kemenangannya melawan Uni Soviet pada Perang Dunia II. Di kawasan Pasifik, kekuatan hegemoni AS bangkit sejak keberhasilan melawan Jepang pada Perang Pasifik 1941-1945 (Scott, 2018) dan menghasilkan militer Jepang berada di bawah kontrol Amerika Serikat. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat membangun kekuatan di Asia-Pasifik, istilah dan pemetaan yang digunakan sebelum Indo-Pasifik, melalui pendekatan militer dan ekonomi dengan menjalin perjanjian keamanan bilateral dengan negara-negara di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Filipina, Thailand, dan Australia. Dengan perjanjian tersebut, Amerika Serikat diberikan akses untuk membangun pangkalan militer di negara-negara tersebut yang masih eksis hingga saat ini. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat menjanjikan bantuan militer dan ekonomi, serta akses ke pasar Amerika untuk ekspor mereka. Eksistensi pangkalan-pangkalan militer di berbagai penjuru Asia

tersebut tentunya membuat kekuatan militer Amerika Serikat secara keseluruhan semakin unggul dibandingkan negara-negara lainnya. Selain tercapainya kepentingan militer Amerika Serikat, kekuatan hegemoni Amerika di Asia-Pasifik juga menguntungkan kepentingan ekonominya dengan diberikannya akses ke pasar Asia yang begitu besar. 5 dari 10 rekan kerja sama perdagangan utama Amerika pada saat itu adalah negara-negara Asia. Diperkirakan bahwa setiap miliar dolar Amerika yang dihasilkan dari ekspornya ke kawasan tersebut membuka hampir 20.000 lapangan pekerjaan bagi orang Amerika, yang jika ditotalkan berjumlah lebih dari 2,5 juta lapangan kerja berhasil terbuka (Castro, 1994).

Ambisi Amerika Serikat mempertahankan hegemoni nya di Asia-Pasifik terus berlanjut. Pada masa presidensi George W. Bush, fokus utama kebijakan luar negeri AS terarah pada wilayah Timur Tengah akibat peristiwa terorisme 9/11. Walaupun demikian, Bush tetap menjaga kepentingan AS di Asia-Pasifik dengan mempertahankan kerja sama di kawasan tersebut khususnya dengan negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Jepang dan Korea Selatan ikut berkontribusi membantu AS dalam koalisi militer di Irak dan proses Six-Party Talks, sebuah forum multilateral yang bertujuan untuk mencapai denuklirisasi Semenanjung Korea. Tidak hanya penting dalam segi militer, diplomasi, dan geopolitik, Asia Timur juga mempunyai signifikansi yang besar bagi AS dalam segi ekonomi. Perdagangan Amerika dengan Asia Timur dan Pasifik meraup \$600 Miliar per tahun, lebih besar dari jumlah perdagangan dengan Uni Eropa (Kelly, 2005). Untuk kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara, Amerika Serikat tidak hanya menjalin kerja sama secara bilateral dengan Thailand dan Filipina, tetapi juga dengan organisasi regional di kawasan tersebut, yaitu the Association of Southeast Asian Nation (ASEAN). AS merupakan salah satu anggota ASEAN Regional Forum (ARF) dan aktif berkontribusi dalam setiap pertemuan tingkat kerja tahunan.

Lewat pertemuan tersebut AS berusaha membangun kepercayaan dan kerja sama di aspek-aspek penting seperti peningkatan keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara, non-proliferasi, dan strategi kontra-terorisme (Kelly, 2005).

Di bawah administrasi Barack Obama, eksistensi dan pengaruh AS di Asia-Pasifik ingin jauh lebih diperkuat dengan menggeser fokus kebijakan luar negeri AS dari Timur Tengah ke Asia. Kebijakan luar negeri “Pivot to Asia” pun lahir pada November 2011 sebagai strategi regional AS di kawasan Asia-Pasifik. Dalam implementasi kebijakan Pivot to Asia, terdapat 4 aspek yang menjadi fokus AS: Organisasi multilateral, ekonomi dan perdagangan, keamanan, dan demokrasi (Lieberthal, 2011). Dalam aspek organisasi multilateral dan ekonomi, AS mulai merundingkan pendirian Trans-Pacific Partnership (TPP) yang diharapkan akan menjadi platform perdagangan dan investasi antar negara negara ‘*emerging economies*’ di rAsia-Pasifik. Sementara dalam bidang keamanan, AS bergabung dengan East Asia Summit (EAS) dengan upaya mengarahkan negara-negara anggota untuk fokus pada masalah-masalah keamanan maritim kompleks, khususnya konflik Laut Cina Selatan (LCS) yang dihadapi negara-negara ASEAN, Tiongkok, dan Taiwan. Misi AS tersebut didukung oleh sebagian besar anggota, khususnya negara-negara di Asia Tenggara yang menjadi kompetitor melawan agresivitas Tiongkok di kontestasi LCS.

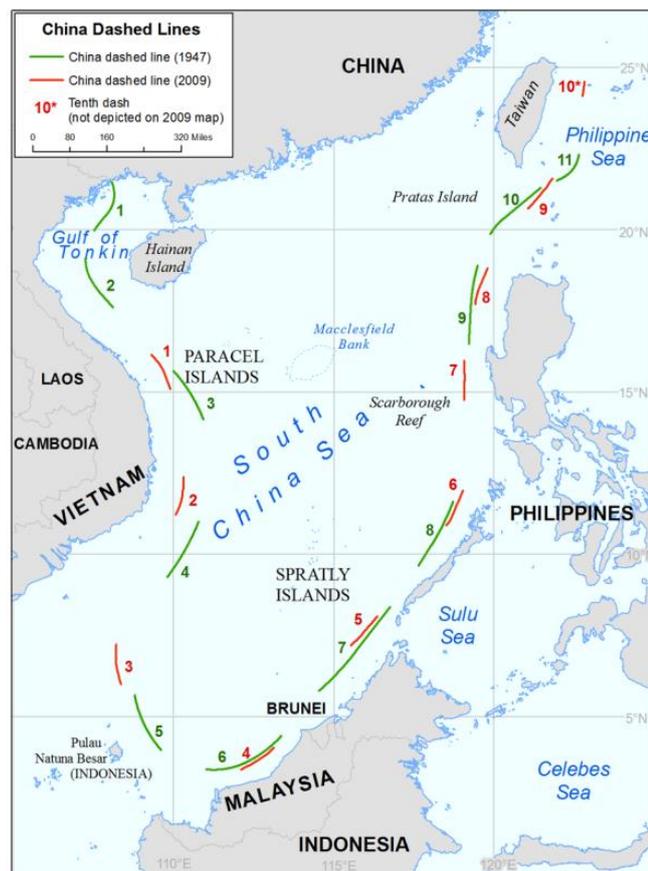
Tidak hanya aktif dalam forum multilateral, kepentingan kemanan di Asia-Pasifik juga dijalankan Obama dengan melindungi investasi dan pendanaan untuk keamanan di Asia dari pemotongan anggaran pengeluaran militer AS dan menggeser fokus militer AS dari Irak dan Afghanistan ke Asia (Lieberthal, 2011), sebagaimana telah ditegaskan oleh Obama dalam pidatonya di Parlemen Australia pada 17 November 2011 “...*As we end today’s wars, I have directed my national security team to make our presence and mission in the Asia-Pacific a top priority..*” (The Obama White House,

2011). Secara politik, AS juga berambisi memimpin negara-negara Asia-Pasifik dalam mempromosikan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Setelah Obama, Donald Trump terpilih sebagai presiden AS dengan membawa perubahan pendekatan AS terhadap dinamika internasional. Terlepas dari doktrin 'America First' yang membuat AS lebih menekankan unilateralisme sebagai pendekatan kebijakan luar negerinya, upaya mempertahankan pengaruh AS di Asia-Pasifik tetap eksis dengan "Free and Open Indo-Pacific" (FOIP). Pada Desember 2017, laporan "The National Security Strategy of the United States" rilis dan terdapat bagian khusus yang menjelaskan visi Amerika di kawasan Indo-Pasifik. Sejak saat itu, istilah dan pemetaan "Asia-Pasifik" diubah menjadi "Indo-Pasifik" dalam laporan-laporan strategi resmi AS (Heiduk and Wacker, 2020). Perubahan istilah "Asia-Pasifik" menjadi "Indo-Pasifik" tidak hanya sebatas perubahan nomenklatur regional, tetapi perubahan itu juga membuat cakupan geografis kawasan tersebut menjadi jauh lebih luas, yang tentunya akan mendukung kepentingan AS di kawasan tersebut. Perluasan cakupan kawasan ini muncul sebagai langkah strategis AS untuk mengelola kebangkitan Tiongkok sambil menstabilkan peran dan pengaruhnya sendiri di kawasan tersebut (Saha, 2019). Gagasan Indo-Pasifik ini mencakup eksistensi dan peran India, negara *emerging power* yang merupakan mitra strategis AS sekaligus rival Tiongkok.

Setelah empat tahun komando kebijakan luar negeri AS berada di tangan Donald Trump, Presiden Joe Biden terpilih dengan membawa pendekatan yang lebih asertif terhadap kebijakan luar negeri AS, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Keseriusan administrasi Biden dalam memperkuat pengaruhnya di Indo-Pasifik dapat dilihat dari laporan "Indo-Pacific Strategy" yang dirilis The White House pada Februari 2022. Ambisi besar AS mempertahankan pengaruhnya di Indo-Pasifik dari masa ke masa tidak lepas dari pengaruh kekuatan Tiongkok yang terus meningkat pesat hingga

menjadi potensi hegemon baru. Dikutip dari laporan Indo-Pacific Strategy AS, fokus AS yang semakin intensif ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa Indo-Pasifik menghadapi tantangan yang semakin besar dari Tiongkok. Tiongkok menggabungkan kekuatan ekonomi, diplomatik, militer dan teknologinya untuk menjadi kekuatan paling berpengaruh di dunia (Indo-Pacific Strategy of the United States, 2022). Asertifitas Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, terutama di Laut Cina Selatan memicu AS juga semakin agresif dalam mempertahankan pengaruh dan kepentingan di kawasan tersebut. Sikap agresif AS juga dijustifikasi dengan dalih untuk melindungi sekutu dan mitra AS di kawasan Indo-Pasifik yang terus mendapatkan tekanan dari Tiongkok.



Gambar 1.2 Perbandingan Peta *Eleven-dash line* dan *Nine-dash line* Tiongkok

Sumber: (U.S Department of State, 2014)

Agresivitas Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik memang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, khususnya di kawasan Laut Cina Selatan yang menjadi arena kontestasi saling klaimnya dengan beberapa negara Asia Tenggara. Klaim Tiongkok atas Laut Cina Selatan berawal pada tahun 1947 dengan *eleven-dash line* atau sebelas garis putus-putus yang mengepung seluruh kawasan Laut Cina Selatan, termasuk Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly. Kemudian pada tahun 1953, Partai Komunis Tiongkok yang memimpin pada saat itu, menghapus Teluk Tonkin yang terletak di barat laut kawasan Laut Cina Selatan dari klaimnya, dan menyederhanakan klaimnya menjadi *nine-dash line* yang masih menjadi kerangka klaim Tiongkok terhadap Laut Cina Selatan sampai sekarang ini (CFR, 2020). Walaupun klaim Tiongkok tersebut tidak sesuai dengan perjanjian *United Nations Conventions on the Law of the Sea* (UNCLOS), klaim sepihak ini dijustifikasi Cina secara hukum dengan mengesahkan Hukum Perairan Teritorial pada tahun 1992, yang pada dasarnya mengklaim kedaulatan atas seluruh kawasan Laut Cina Selatan berdasarkan latar belakang dan hak historis (Guan, 2010; CFR, 2020).

Agresivitas Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan pun terus meningkat di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Pada awal pemerintahannya, Xi Jinping sudah berkomitmen untuk menjadikan penjagaan kedaulatan dan keamanan negara, dan pertahanan integritas teritorial sebagai salah satu prioritas tertingginya. Komitmen kuat tersebut dimanifestasikan dalam kebijakan Tiongkok yang menjadi lebih asertif di kawasan Laut Cina Selatan (Sinaga, 2015). Sejak tahun 2013, Tiongkok telah memperkuat klaimnya di kawasan tersebut dengan meningkatkan pembangunan pulau-pulau reklamasi di beberapa titik terumbu karang, seperti *Quarteron Reef*, *Fiery Cross Reef*, *Gaven Reef*, *Hughes Reef*, *Johnson South Reef*, *Mischief Reef*, dan *Subi Reef* yang di mana, beberapa titik terumbu karang tersebut masih menjadi wilayah sengketa

dengan Filipina, Vietnam, Malaysia dan Taiwan. *Hughes Reef*, *Johnson South Reef*, dan *Mischief Reef* berada di dalam ZEE 200 mil laut yang diklaim oleh Filipina (Elsea and Lawrence, 2015). Beberapa pulau-pulau reklamasi tersebut, khususnya di kawasan kepulauan Spratly, telah dimiliterisasi Tiongkok dengan pembangunan gudang rudal, hanggar pesawat, landasan pacu pesawat tempur, hingga fasilitas logistik, komunikasi, dan pengumpulan intelijen. Pulau-pulau tersebut pun turut dipersenjatai dengan berbagai peralatan pengawasan dan senjata hingga sistem rudal anti-kapal dan anti-pesawat (Institute for Maritime and Ocean Affairs, 2016; Associated Press, 2022; Benar News, 2022). Per tahun 2016, Tiongkok telah membangun pulau-pulau reklamasi dengan total luas 3.200 hektar di beberapa titik di Laut Cina Selatan (Institute for Maritime and Ocean Affairs, 2016).

Ambisi Tiongkok untuk terus melancarkan aksi reklamasi di Laut Cina Selatan ini kerap menuai komdemnasi dari Amerika Serikat. Pada tahun 2015 dalam acara konferensi keamanan internasional tahunan, Shangri-la Dialogue, Menteri Pertahanan Amerika pada saat itu, Ash Carter, itu mengajak negara-negara pengklaim Laut Cina Selatan untuk mendesak Tiongkok untuk menghentikan proyek reklamasinya dengan menyatakan *“First, we want a peaceful resolution of all disputes. To that end, there should be an immediate and lasting halt to land reclamation by all claimants.”* (Al Jazeera, 2015). Pernyataan ini pun langsung mendapat respon dari pihak Tiongkok yang juga hadir pada konferensi tersebut dengan mengatakan bahwa pernyataan pihak Amerika Serikat adalah pernyataan yang tidak berdasar dan tidak konstruktif. Kondemnasi Amerika Serikat terhadap reklamasi pulau yang berkelanjutan oleh Tiongkok tersebut juga diwujudkan dalam sebuah kebijakan pembatasan visa dan ekspor yang menargetkan perusahaan milik Tiongkok dan para eksekutif mereka yang terlibat dalam pembangunan pulau reklamasi Tiongkok di Laut Cina Selatan. Tercatat

pada Agustus 2020, Departemen Perdagangan Amerika Serikat memblokade aktivitas ekspor 24 perusahaan Tiongkok ke Amerika Serikat karena peran mereka dalam membantu militer Tiongkok dalam pembangunan pulau-pulau reklamasi dan ikut berperan dalam memiliterisasi pulau-pulau tersebut (Pham, 2020).

Selain pembangunan pos-pos militer di pulau-pulau reklamasi yang dikembangkan di Laut Cina Selatan, ancaman Tiongkok pun juga hadir dengan aksi dan sikap agresif terhadap negara-negara Asia Tenggara, khususnya negara-negara yang terlibat dalam kontestasi sengketa Laut Cina Selatan, terutama Filipina yang merupakan salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat. Beberapa contoh kasusnya adalah pada November tahun 2021, *China Coast Guard* atau Penjaga Pantai Tiongkok memblokir dan menyemprotkan meriam air bertekanan tinggi ke dua kapal suplai makanan Filipina untuk pasukan Filipina yang menduduki *Second Thomas Shoal*, beting yang terletak di lepas pantai barat Provinsi Palawan yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina (Gomez, 2021). Manila kemudian memerintahkan kapal Beijing untuk menghentikan serangan dan memperingatkan bahwa kapal suplainya dilindungi oleh perjanjian pertahanan bersama dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat tentunya mengecam tindakan Tiongkok tersebut dan memperingatkan bahwa serangan terhadap kapal-kapal Filipina akan memperkuat komitmen pertahanan Filipina bersama Amerika Serikat (Reuters, 2021). Hal serupa juga pernah terjadi beberapa kali pada tahun 2014. Kapal pasukan *coast guard* Tiongkok berusaha memblokir akses kapal suplai makanan Filipina yang dibawa untuk pasukan militer di *Second Thomas Shoal*. Pada percobaan pertama, Tiongkok berhasil menghalangi misi kapal Filipina tersebut. Dua minggu kemudian, Filipina kembali menjalankan misinya dengan membawa sejumlah jurnalis untuk menyaksikan langsung aksi blokade yang kerap dilakukan Tiongkok terhadap kapal-kapal Filipina. Sehari setelah insiden tersebut, Filipina mengajukan kasus

melawan Tiongkok ke pengadilan arbitrase PBB di Den Haag dalam rangka menentang klaim Tiongkok yang mencakup hampir seluruh Laut Cina Selatan (BBC News, 2014). Pada tahun 2016, pengadilan memenangkan Filipina dalam kasus arbitrase atas Laut Cina Selatan dan menemukan bahwa klaim “*nine-dash line*” Tiongkok tidak berdasar dan tidak valid. Pengadilan juga menemukan bahwa Tiongkok telah melanggar hak kedaulatan Filipina di zona ekonomi eksklusifnya dengan mengganggu penangkapan ikan dan eksplorasi minyak Filipina, membangun pulau reklamasi, dan membiarkan nelayan Tiongkok menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif Filipina (Santos, 2016). Hasil pengadilan tersebut ditolak Tiongkok dan Presiden Xi Jinping secara tegas mengatakan hasil pengadilan tidak akan mempengaruhi kedaulatan teritorial dan hak laut Tiongkok di Laut Cina Selatan. Di saat yang bersamaan ia mengatakan akan terus berkomitmen untuk menyelesaikan perselisihan dengan para negara pengklaim (Phillips, Holmes and Bowcott, 2016).

Dengan asertifitas Tiongkok yang terus meningkat pesat tentu saja mengusik Amerika Serikat yang juga memiliki kepentingan strategis di kawasan Laut Cina Selatan. Konfrontasi militer Tiongkok dan Amerika Serikat telah sering terjadi di kawasan tersebut akibat konflik kepentingan keduanya. Tiongkok memiliki kepentingan untuk menjaga klaim teritorialnya sementara klaim tersebut bersinggungan dengan kepentingan ‘*Freedom of navigation*’ Amerika Serikat. *Freedom of navigation* adalah operasi oleh angkatan laut dan udara Amerika Serikat yang bertujuan untuk menjaga hak dan kebebasan dalam bernavigasi di laut internasional sesuai dalam perjanjian hukum laut UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) (Freund, 2017). Laut Cina Selatan begitu penting untuk operasi *freedom of navigation* Amerika Serikat karena kawasan tersebut merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Jalur perairan Laut Cina Selatan dilewati dan disinggahi kapal yang

mengangkut ekspor dan impor antara pasar di Asia dan pasar kontinen lainnya, termasuk Amerika. Diperkirakan setiap tahunnya total perdagangan sebesar 5,4 triliun Dollar Amerika melewati kawasan Laut Cina Selatan. Melewati banyak wilayah negara dan singgah di berbagai pelabuhan yang ada di sekitar perairan tersebut akan membutuhkan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama untuk pengiriman barang ekspor dan impor. Karena kepentingan tersebut, banyak negara, termasuk Amerika Serikat sangat tegas dalam memastikan bahwa kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan harus dihormati dan ditegakkan (Freund, 2017).

Dalam operasinya, Amerika Serikat sering kali dihalangi oleh pasukan militer Tiongkok. Pada Mei 2015, pesawat Amerika Serikat, P8-A Poseidon terbang di atas pulau Spratly, dekat dengan pulau reklamasi Tiongkok, untuk menjalankan operasi *freedom of navigation*. Militer angkatan laut Tiongkok pun memerintahkan Amerika Serikat untuk meninggalkan area tersebut hingga delapan kali karena dianggap telah memasuki wilayah Tiongkok tanpa izin dan telah melanggar kedaulatan Tiongkok. Pasukan Amerika Serikat pun mengabaikan peringatan dari Tiongkok dan terus melanjutkan operasi. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pun ikut menegaskan bahwa pesawat Amerika Serikat telah beroperasi sesuai dengan hukum internasional dan akan terus melakukan operasi tersebut, konsisten dengan kebebasan hak dan penggunaan laut internasional yang sah secara hukum (ABC News, 2015). Ketegangan antar keduanya pun terjadi kembali baru-baru ini pada bulan Juli 2022, ketika Angkatan Laut Amerika Serikat berlayar mendekati kepulauan Paracels untuk menjalankan patroli *freedom of navigation*. Militer Tiongkok pun memperingati Amerika Serikat dengan menyatakan bahwa mereka melacak setiap pergerakan kapal Amerika Serikat dan kemudian memerintahkan kapal tersebut untuk segera meninggalkan area Paracels karena telah memasuki perairan teritorial Tiongkok secara

ilegal. Dalam *press release*, Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat menegakkan hak, kebebasan, dan penggunaan laut yang sah sesuai dengan hukum internasional yang berlaku (CBS News, 2022).

Angkatan Laut Tiongkok juga kerap beroperasi di Laut Cina Timur, wilayah perairan yang menjadi arena perselisihan sengketanya dengan Jepang, lebih tepatnya di Kepulauan Senkaku / Kepulauan Diaoyu. Bulan Juni 2016 menandai pertama kali masuknya kapal perang fregat PLAN ke zona tambahan Jepang di sekitar Kepulauan Senkaku, Jepang (Japan Ministry of Defense, 2022). Dalam laporan Kementerian Pertahanan Jepang tahun 2022, kapal PLAN rutin memasuki wilayah tambahan Jepang, khususnya dekat Kepulauan Senkaku, hampir setiap tahun sejak 2016 (Japan Ministry of Defense, 2022). Asertifitas Tiongkok salah satunya dapat dilihat pada awal 2021, di mana kapal *China Coast Guard* memasuki perairan Senkaku dan melakukan berbagai upaya untuk mendekati kapal Jepang yang berlayar di perairan tersebut, sebagai langkah untuk menegaskan kedaulatannya atas Kepulauan Diaoyu / Senkaku (Ryall, 2021).

Untuk menyeimbangkan kekuatan dan ancaman yang terus meningkat oleh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, sebuah pakta keamanan baru yang dipimpin Amerika Serikat berhasil dibentuk. Pada 15 September 2021, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris meluncurkan secara resmi sebuah pakta trilateral keamanan 'AUKUS' yang memiliki tujuan awal untuk memfasilitasi Australia dalam mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir dengan bantuan teknologi yang disediakan Amerika Serikat dan Inggris. Kesepakatan ini juga merupakan momen pertama kali Amerika Serikat dalam berbagi teknologi nuklir dengan mitra selain Inggris. Selain itu, AUKUS juga didirikan sebagai komitmen kerja sama dalam aspek pertahanan di kawasan Indo-Pasifik, yang di mana kebangkitan kekuatan dan perilaku

Tiongkok di kawasan tersebut yang dipandang sebagai ancaman yang meningkat pesat (Wintour, 2021). Dalam aliansi ini juga, ketiga negara akan memperdalam kerja sama dalam berbagai aspek pertahanan kontemporer, seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), siber, teknologi kuantum, pertahanan maritim khususnya bawah laut hingga penyelarasan yang lebih erat terkait kebijakan dan tindakan regional serta integrasi yang lebih kuat atas militer dan industri pertahanan (Borger and Sabbagh, 2021; Moriyasu, 2021). Beberapa bulan setelah peluncuran AUKUS, AUKUS pun menambah empat area kerja sama dalam agenda pengembangan teknologi kontemporer tersebut, yaitu kerja sama dalam pengembangan hipersonik dan anti-hipersonik, *electronic warfare*, inovasi pertahanan, dan pertukaran informasi (The White House, 2022a).

Walaupun para pemimpin AUKUS mengatakan bahwa pakta keamanan ini dibentuk untuk memfasilitasi Australia dalam mengembangkan kapal tenaga nuklir dan tidak menyebut Tiongkok dalam pernyataannya mengenai AUKUS, tetapi tak dapat dipungkiri bahwa inisiatif Amerika Serikat dan aliansinya membentuk kerja sama tersebut untuk merespon ekspansionisme Tiongkok di Laut Cina Selatan (Borger and Sabbagh, 2021). Hal tersebut dapat dilihat dengan bagaimana Presiden Joe Biden juga mengatakan bahwa Amerika Serikat dan dunia bergantung pada “*free and open Indo-pacific*”, yang tentunya bersinggungan dengan klaim teritorial Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan.

Konflik kepentingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan diperkirakan akan menjadi lebih tegang dengan kehadiran AUKUS. Hal tersebut dikonfirmasi dengan respon negatif dan kritikan Tiongkok terhadap pembentukan AUKUS. Pada September 2021, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, mengekspresikan kritikan keras terhadap Amerika Serikat,

Australia, dan Inggris yang dinilainya sebagai “pelanggar aturan” dengan perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) sebagai rujukan. Terkutip pernyataan Wang Wenbin:

The US and the UK export nuclear submarines to Australia out of geopolitical and economic considerations. They did so in violation of the object and purpose of the Nuclear Non-proliferation Treaty (NPT), creating risks of the proliferation of nuclear materials and technology. Their moves have a huge impact on the international nuclear non-proliferation regime. This fully shows that the three countries are typical rules-breakers. (Embassy of the People’s Republic of China in the Commonwealth of Australia, 2021)

Ketiga negara pencetus AUKUS dianggap Tiongkok sangat terobsesi dengan kekuatan sampai mengancam stabilitas kawasan dengan proliferasi nuklir, memicu perlombaan senjata, dan juga tidak menghormati sentralitas ASEAN di kawasan Asia Tenggara atau Laut Cina Selatan. Dalam berbagai konferensi pers pihak Tiongkok sering kali menyebutkan bagaimana AUKUS dapat memicu perlombaan senjata, mengindikasikan bahwa Tiongkok dan negara-negara di sekitar kawasan dapat saja meningkatkan kekuatannya karena kehadiran AUKUS di kawasan Laut Cina Selatan. Dalam akhir pidatonya, Wang Wenbin mendesak Amerika Serikat, Inggris, dan Australia untuk meninggalkan mentalitas agresif yang disebutnya “*Cold war zero-sum mentality*” dan sepatutnya menjunjung tinggi sistem non-proliferasi nuklir internasional, menjaga perdamaian, stabilitas dan pembangunan regional dan dunia, bukan sebaliknya.

Dengan uraian pendahuluan yang telah dipaparkan, penelitian ini akan menganalisis bentuk-bentuk ancaman dan agresivitas Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik yang pada akhirnya memicu AS melakukan kebijakan *balancing* terhadap ancaman Tiongkok tersebut melalui pakta pertahanan AUKUS, dengan menggunakan teori *Balance of Threat* yang dikembangkan oleh Stephen M. Walt. Dengan teori tersebut, argumen utama pada penelitian ini adalah iniasi kebijakan *balancing* AS

dalam membentuk AUKUS tidak hanya dilatarbelakangi oleh meningkatnya kekuatan Tiongkok, tetapi juga karena adanya berbagai tindakan dan intensi agresif yang ditunjukkan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik hingga mengancam keamanan dan kepentingan AS dan sekutunya; yang secara geografis rentan akan ancaman tersebut. Selain menganalisis berbagai indikator ancaman Tiongkok yang menyebabkan AS melakukan *balancing*, penelitian ini juga menganalisis bagaimana bentuk *balancing* AS dalam merespon ancaman Tiongkok tersebut melalui AUKUS. Analisis tersebut didukung dengan melihat adanya intensi AS untuk menyeimbangkan ancaman Tiongkok dengan mengadakan agenda pengembangan berbagai teknologi keamanan kontemporer pada AUKUS, yang juga merupakan teknologi keamanan yang dikembangkan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir.

Kemudian penelitian ini juga akan mencakup analisis dampak eksistensi AUKUS terhadap dinamika keamanan regional kawasan Indo-Pasifik. Analisis dampak tersebut akan menggunakan teori *Regional Security Complex* (RSC) yang dikembangkan oleh Barry Buzan dan Ole Wæver sebagai teori pendukung penelitian. Dalam menganalisis dampak AUKUS terhadap dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik, akan menggunakan dua tingkatan analisis sesuai dengan teori RSC, yaitu dimulai dengan tingkat analisis domestik yang akan digunakan untuk menganalisis kebijakan keamanan Tiongkok pasca AUKUS. Setelah itu, akan dianalisis bagaimana AUKUS dan kebijakan keamanan Tiongkok pasca AUKUS berdampak terhadap dinamika keamanan regional kawasan Indo-Pasifik, yang pada teori RSC menggunakan tingkat analisis regional.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada kebijakan dan implementasi penyeimbangan ancaman oleh Amerika Serikat melalui AUKUS terhadap ancaman Tiongkok di

kawasan Indo-Pasifik yang meningkat di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping (2013-2022). Dengan batasan masalah tersebut, pertanyaan penelitian yang dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana implementasi “*Balance of Threat*” Amerika Serikat terhadap ancaman Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik?
2. Bagaimana dampak dari eksistensi AUKUS terhadap dinamika keamanan regional Indo-Pasifik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

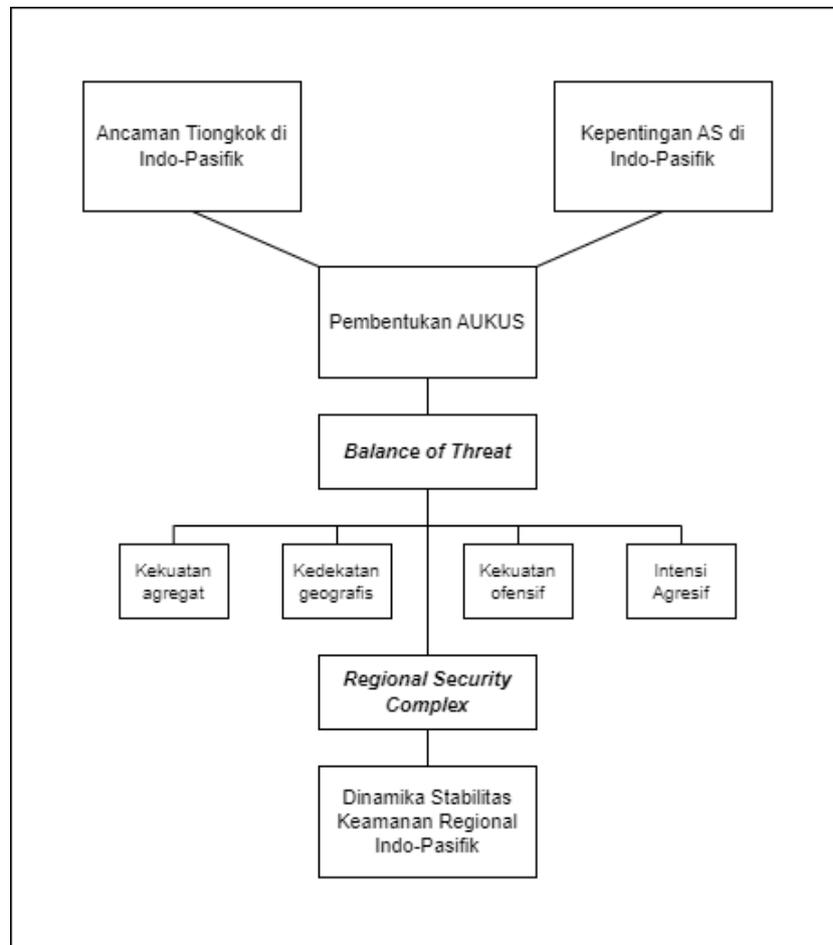
1. Untuk mengetahui AUKUS sebagai implementasi “*Balance of Threat*” Amerika Serikat yang dilancarkan untuk merespon ancaman Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan
2. Untuk mengetahui dampak dari pembentukan AUKUS terhadap stabilitas keamanan regional Indo-Pasifik

Dengan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai:

1. Salah satu bentuk kontribusi berupa informasi terhadap ilmu hubungan internasional, khususnya pada politik internasional, studi keamanan dan kajian strategis, dan studi kawasan.
2. Salah satu referensi dalam mengkaji dan menganalisis implementasi teori *Balance of Threat* dan teori *Regional Security Complex* yang pada penelitian ini menggunakan studi kasus AUKUS sebagai respon ancaman Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan.

3. Salah satu referensi bagi akademisi dan masyarakat secara luas untuk memperluas wawasan tentang studi keamanan dan strategis di kawasan Indo-Pasifik.

D. Kerangka Konseptual



Bagan 1.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan bagan di atas, dapat dilihat teori *balance of threat* akan menjadi teori pendukung utama penelitian ini, sebagaimana teori *balance of threat* akan digunakan dalam menganalisis ancaman-ancaman Tiongkok yang mengganggu kepentingan Amerika Serikat di Indo-Pasifik sehingga memicu Amerika Serikat untuk membentuk AUKUS, sebuah pakta keamanan baru dengan Inggris dan Australia. Ancaman-ancaman Tiongkok yang dianalisis pun sesuai dengan empat indikator ancaman yang dikemukakan Stephen M. Walt pada teori *balance of threat*, yaitu kekuatan agregat, kedekatan geografis, kekuatan ofensif, dan intensi agresif. Kemudian

teori *regional security complex* akan digunakan untuk menganalisis dampak AUKUS terhadap stabilitas keamanan regional Indo-Pasifik, sebagaimana asumsi penelitian ini adalah AUKUS menimbulkan kekhawatiran dan sikap tidak aman terhadap Tiongkok kemudian memicu Tiongkok meningkatkan intensitas kebijakan keamanan mereka yang pada akhirnya juga menimbulkan kekhawatiran negara-negara sekitarnya hingga terbentuk *regional security complex* di Indo-Pasifik.

1. Konsep *Balancing* (*Balance of Threat*)

Konsep *Balancing* berangkat dari paradigma neorealisme yang menekankan pentingnya suatu negara untuk menyeimbangkan kekuatan mengingat sistem internasional merupakan sistem yang anarkis dan kompetitif, menjadikan motivasi utama negara adalah *survival* atau bertahan hidup (Bendel, 1994). Mengingat terdapat anarki pada tatanan sistem internasional, tidak ada negara yang bebas dari ancaman eksternal atau pihak luar. Jika negara mendapat ancaman yang begitu signifikan dari pihak eksternal, negara akan merespon dengan '*Balancing*' atau '*Bandwagoning*' yang di mana *balancing* merujuk tindakan suatu negara beraliansi dengan negara-negara atau pihak lain untuk melawan ancaman yang berlaku, dan *bandwagoning* merujuk pada tindakan suatu negara yang beraliansi dengan sumber ancaman tersebut (Waltz dikutip dalam Walt, 1987). Menurut Bendel, Pendekatan *balancing* dinilai merupakan langkah yang lebih tepat untuk menjamin sekuritas kepentingan suatu negara dalam jangka panjang, dibandingkan dengan *bandwagoning* yang dalam jangka panjang akan memperparah keamanan negaranya sendiri dengan ikut berkontribusi dalam meningkatkan *power* atau kekuatan sekutunya (Bendel, 1999).

Sebelum teori *balancing* dan berbagai macam tipe nya dikembangkan oleh para neorealis, seperti Kenneth Waltz dan John Mearsheimer, '*Balance of Power*'

pertama kali dikemukakan oleh Hans. J. Morgenthau, seorang pemikir paradigma realisme klasik, sebagai konsep dalam Hubungan Internasional dalam bukunya '*Politics among Nations*' pada tahun 1948 (Diez et al., 2014). Morgenthau menjelaskan *Balance of Power* sebagai "keadaan aktual di mana kekuasaan atau kekuatan didistribusikan di antara beberapa negara dengan perkiraan (tingkatan) yang setara" (Morgenthau dikutip dalam Diez, 2014, hal 6).

Konsep tersebut dikembangkan para ilmuwan neorealis, Kenneth Waltz, John Mearsheimer dan Hedley Bull sebagai sebuah teori yang dijadikan sebagai parameter untuk menganalisa reaksi suatu negara akan kekuatan yang dimiliki negara lain. *Balance of Power* memiliki asumsi bahwa negara adalah aktor kesatuan yang dalam upaya minimum nya akan selalu mencari pelestarian atau menjaga keberlangsungan hidup mereka sendiri dan dalam upaya maksimal nya akan berjuang untuk memperoleh dominasi universal (Waltz, 1979). Menurut Waltz, Negara akan melakukan berbagai cara, seperti memanfaatkan sarana dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam mencapai tujuan yang diinginkan tersebut, *Balance of Power* dalam upaya nya terbagi menjadi dua: *Internal Balancing* dan *External Balancing*. *Internal Balancing* adalah upaya menyeimbangkan kekuatan yang dilakukan negara dengan meningkatkan kapabilitas internal negara dalam berbagai aspek seperti ekonomi, militer, dan juga pengembangan strategi-strategi, sedangkan *External Balancing* adalah upaya menyeimbangkan kekuatan dengan cara memperbesar dan memperkuat aliansi sendiri dengan tujuan untuk melemahkan dan melawan rival dan aliansinya yang merupakan hegemon atau berpotensi menjadi hegemon (*rising power*) (Waltz, 1979).

Pandangan lain mengenai *Balancing* dikembangkan oleh Stephen M. Walt dengan teori '*Balance of Threat*' yang berasumsi bahwa suatu negara bereaksi dengan meningkatkan kekuatannya bukan akibat kekuatan (*power*) yang dimiliki negara lain, tetapi dengan ancaman (*threat*) yang ditimbulkan negara lain tersebut (Walt dikutip dalam Bock & Henneberg, 2014). Teori tersebut muncul sebagai kontra dari *Balance of power* yang berasumsi bahwa upaya negara untuk meningkatkan kekuatannya dipicu akibat kekuatan yang dimiliki negara lain, yang memiliki potensi hegemoni, dengan cara menyeimbangkan kekuatannya (Waltz dikutip dalam Bock & Henneberg, 2014). *Balance of power* berasumsi bahwa semakin besar kekuatan suatu negara merefleksikan niat ofensif negara tersebut. Sebaliknya, dengan teori *Balance of threat*, Walt berpendapat bahwa tidak selamanya negara dengan kekuatan besar menunjukkan intensi ofensif. Teori *Balance of threat* tersebut didukung oleh sejarah, di mana pada saat Perang Dingin, diketahui kekuatan Amerika Serikat lebih besar daripada kekuatan Uni Soviet, tetapi banyak negara yang memutuskan untuk beraliansi dengan Amerika Serikat dengan bergabung dengan NATO karena Uni Soviet dilihat lebih agresif dan memberikan ancaman yang lebih besar. Maka dari itu, Walt berpendapat bahwa baik *balancing* dan *bandwagoning* lebih tepat dipandang sebagai respon ancaman yang ditimbulkan oleh negara lain. Walt menekankan pentingnya ancaman dalam menentukan perilaku negara dan pembentukan aliansi. Dia berpendapat bahwa negara membentuk aliansi ketika pihak lain menjadi ancaman (Walt dikutip dalam Vasanthakumar, 2018). Negara membentuk aliansi ketika keberlangsungan hidup mereka terancam, ingin mengekang niat agresif negara rival, dan ketika mereka melihat inklusi mereka dalam aliansi dapat membuatnya lebih kuat dan berada dalam posisi untuk mendominasi aliansi. Teori oleh Walt ini pun hadir dengan 4

indikator untuk menilai suatu ancaman, yaitu dengan: kekuatan agregat (*aggregate power*), kedekatan geografis (*geographic proximity*), kekuatan ofensif (*offensive power*), dan intensi agresif (*aggressive intention*) (Walt, 1987).

Dalam indikator kekuatan agregat, Walt meyakini bahwa semakin besar total sumber daya suatu negara, baik itu dari populasi, kemampuan industri dan militer, ekonomi, hingga kecakapan teknologi, semakin besar potensi ancaman yang dapat negara tersebut timbulkan kepada negara lain. Kedekatan geografis juga dapat menjadi sebuah ancaman di mana suatu negara dapat lebih mengekspresikan kekuatannya dengan negara yang secara geografis dekat dengannya. Indikator kekuatan ofensif merujuk pada kemampuan untuk mengancam kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Ancaman langsung yang dapat ditimbulkan kekuatan ofensif ini dapat membangun insentif yang kuat bagi negara-negara untuk segera menyeimbangkan (Langer dikutip dalam Walt, 1987). Dan indikator terakhir, intensi agresif juga akan memprovokasi negara-negara lain untuk menyeimbangkan, sebagaimana perilaku agresif juga membawa dampak ancaman yang langsung dan kuat bagi negara-negara lain.

Sejalan dengan pandangan *balancing* yang dikemukakan Stephen M. Walt, penelitian ini akan menggunakan Teori *Balance of Threat* untuk melihat kebijakan Amerika Serikat yang dilancarkan melalui aliansi AUKUS melancarkan *balancing* melawan Tiongkok akibat ancaman dan agresivitas yang telah dikerahkannya di kawasan Indo-Pasifik, khususnya di kawasan Laut Cina Selatan. Ancaman yang ditimbulkan Tiongkok akan diklasifikasikan dengan empat indikator yang telah dikemukakan oleh Walt dalam teorinya, yaitu kekuatan agregat, kedekatan geografis, kekuatan ofensif, dan intensi agresif. Dengan teori ini juga akan

dianalisis kebijakan-kebijakan Amerika Serikat dalam menyeimbangkan ancaman dengan empat indikator tersebut

2. Konsep *Regional Security Complex*

Regional Security Complex (RSC) muncul sebagai konsep dalam tatanan keamanan internasional yang secara spesifik berusaha menganalisa perkembangan dan dinamika keamanan yang di terjadi dalam suatu kawasan. Buzan dan Wæver memecah sejarah RSC ke dalam 3 tahapan: Era modern (1500-1945); masa Perang Dingin dan dekolonisasi (1945-1989); dan periode pasca Perang Dingin yang dimulai sejak 1990 (Buzan and Wæver, 2003). Pada masa era modern, keamanan kawasan telah eksis tetapi masih didominasi oleh kekuatan global. Pada tahapan kedua dan ketiga, yaitu pada periode Perang Dingin dan pasca Perang Dingin, ruang lingkup keamanan regional mulai berkembang dengan dimulainya era dekolonisasi, di mana dekolonisasi membuka ruang untuk dinamika militer dan politik kawasan untuk berkembang akibat mulainya kebebasan dari gangguan intrusi militer dan politik negara-negara adikuasa (Buzan and Wæver, 2003). Karena perkembangan tersebut lah dibutuhkan sebuah konsep maupun teori yang fokus pada signifikansi dinamika regional atau kawasan dalam tatanan keamanan internasional.

Konsep *Regional Security Complex* pertama kali diperkenalkan oleh seorang pemikir mazhab Kopenhagen atau *Copenhagen School*, Barry Buzan dalam bukunya '*People, States, & Fear*' yang dipublikasikan pada tahun 1983 kemudian dikembangkan pada tahun 1998 bersama Wæver dan Wilde, hingga dikembangkan menjadi *grand theory* atau teori besar pada buku '*Regions and Powers: The Structure of International Security*' (2003). Buzan memperkenalkan konsep *Security Complex* dengan mendefinisikannya sebagai 'sebuah sekelompok negara yang masalah keamanannya saling berhubungan sehingga keamanan nasional

mereka tidak dapat dikatakan terpisah antara satu sama lain' (Buzan, 1983). Pembentukan teori RSC berasal dari konsep *Security Complex* ini pun dikembangkan oleh Buzan, Wæver dan Wilde pada tahun 1998 dengan definisi yang lebih luas, yaitu sebagai berikut:

a set of units whose major processes of securitisation, desecuritisation, or both are so interlinked that their security problems cannot reasonably be analysed or resolved apart from one another (Buzan et al., 1998, Hal 201)

Reformulasi definisi ini dikembangkan atas dasar untuk menghilangkan sifat sentris terhadap negara sebagai aktor dan politik dan militer sebagai fokus subjek (Buzan and Wæver, 2003). Perkembangan organisasi regional, forum regional, dan lain sebagainya merupakan unit yang sudah tidak dapat diabaikan lagi dalam kompleks keamanan kawasan. Seiring berjalannya waktu pun aspek-aspek selain militer dan politik seperti aspek lingkungan dan sosial juga mulai berkembang menjadi hal yang dapat menjadi pengaruh hingga ancaman keamanan.

Asumsi dasar teori *Regional Security Complex* berakar pada kenyataan bahwa semua negara maupun unit di dalam sistem internasional saling bergantung dan berhubungan dalam aspek keamanan, terutama di dalam kawasan yang di mana ancaman keamanan sangat cepat menyebar akibat kedekatan geografis. Buzan juga menyatakan bahwa dampak paling kuat dan paling jelas dari kedekatan geografis pada interaksi keamanan terdapat pada aspek militer, politik, sosial dan lingkungan (Buzan and Wæver, 2003). Buzan juga menjelaskan bentuk interdependensi antar negara dalam *Regional Security Complex* dapat berbentuk *amity* (persahabatan) dan *enmity* (permusuhan) (Buzan and Wæver, 2003). Dalam pola *amity*, interdependensi keamanan dalam RSC dapat terbentuk akibat hubungan baik yang telah dijalin oleh negara-negara terkait dan negara-negara tersebut berusaha untuk

menjaga pertemanan mereka dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan secara kolektif. Di sisi lain, pola *enmity* dalam RSC merupakan interdependensi keamanan yang terbentuk akibat adanya rasa saling curiga, takut, dan tidak percaya satu sama lain.

Teori *Regional Security Complex* memiliki fungsi utama sebagai kerangka kerja untuk menganalisa keamanan regional. Buzan dan Wæver (2003) membawa 4 tingkat analisis yang dapat digunakan dalam menganalisa pengaruh yang membentuk dinamika keamanan kawasan, yaitu;

1. Level domestik. Tingkat domestik menganalisis kebijakan keamanan masing-masing negara dalam kawasan dan aktor dari negara-negara tersebut terhadap negara lain;
2. Level regional. Tingkat regional menganalisis dinamika hubungan dalam kawasan, baik hubungan tersebut berupa persahabatan (*amity*) atau permusuhan (*enmity*). Analisis ini akan mengarahkan pada pembentukan RSC;
3. Level intra-regional. Pada tingkat ini menjelaskan bagaimana pola hubungan antar wilayah atau kawasan dan bagaimana pola tersebut dapat memengaruhi RSC;
4. Level global. Analisis tingkat global melihat peran dan kepentingan kekuatan besar dan negara adidaya di berbagai wilayah dan pengaruhnya terhadap RSC.

Selaras dengan teori *Regional Security Complex* yang dikembangkan oleh Barry Buzan, penelitian ini juga melihat adanya interdependensi keamanan yang membentuk AUKUS, baik dalam bentuk *amity* (persahabatan) dan *enmity* (permusuhan). Hubungan *enmity* antara Amerika Serikat-Tiongkok dan Australia-Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik berkolerasi dengan hubungan *amity* Amerika Serikat-Australia yang telah terjalin sejak lama, memicu kedua negara tersebut

saling menyokong dalam aspek keamanan melalui pembentukan AUKUS. Pada penelitian ini, teori RSC fokus digunakan untuk menganalisis dampak yang dapat terjadi terhadap stabilitas keamanan regional Indo-Pasifik dengan kehadiran AUKUS di kawasan tersebut. Untuk menjawab dampak tersebut, tingkat analisis yang digunakan pun mulai dari analisis tingkat domestik untuk melihat kebijakan keamanan Tiongkok pasca pembentukan AUKUS. Dengan tingkat analisis domestik ini diharapkan dapat mendukung asumsi penelitian ini bahwa AUKUS membawa kekhawatiran dan sikap tidak aman terhadap Tiongkok, yang pada akhirnya kekhawatiran tersebut mempengaruhi kebijakan keamanan Tiongkok. Kemudian, penelitian ini juga disusul dengan tingkat analisis regional yang digunakan untuk melihat dampak kebijakan-kebijakan pakta AUKUS, dan kebijakan keamanan Tiongkok pasca AUKUS terhadap dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Tingkat analisis regional ini juga diharapkan mampu mendukung asumsi penelitian ini bahwa kebijakan-kebijakan AUKUS dan kebijakan-kebijakan keamanan Tiongkok pasca AUKUS akan berdampak terhadap keamanan negara-negara tetangganya seperti negara-negara Asia Tenggara yang sekaligus terlibat kontestasi teritorial Laut Cina Selatan dengan Tiongkok, dan juga negara-negara Asia Timur.

Dengan demikian, secara garis besar dapat dilihat asumsi penelitian ini pun selaras dengan ide utama teori RSC ini bahwa kebijakan keamanan negara-negara dalam suatu kawasan saling berhubungan, dan saling berdampak hingga sulit untuk dipisahkan antara satu sama lain.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang memiliki sifat eksplanatif. Penggunaan metode kualitatif digunakan untuk

memahami suatu fenomena terkait perilaku dan tindakan yang dijabarkan secara terperinci dengan mengandalkan data-data non-numerik (Hammersley, 2013). Dikemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah strategi penelitian yang biasanya menekankan pada kata-kata daripada kuantifikasi dalam pengumpulan data. Melalui pendekatan kualitatif, Penulis akan melakukan analisis terhadap pembentukan AUKUS sebagai bentuk respon Amerika Serikat terhadap ancaman Tiongkok di Indo-Pasifik.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan sebagai data sekunder penelitian dan pengolahan data primer. Dengan teknik studi kepustakaan, Penulis akan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian ini. Untuk data primer, Penulis akan mengumpulkan data dari laporan resmi pemerintah, pernyataan resmi pemerintah, dan dokumen resmi lainnya yang dapat diperoleh di situs resmi pemerintah, khususnya dari Amerika Serikat dan Tiongkok. Sedangkan untuk data sekunder akan diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, dokumen, hingga situs laman berita yang kredibel, serta lembaga non-pemerintah internasional, seperti Council on Foreign Relations, Center for Strategic and International Studies (CSIS), The Diplomat, dan sebagainya.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data eksplanatif. Penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, menguji hipotesis dari variabel-variabel penelitian. Fokus penelitian ini adalah analisis hubungan-hubungan antar variabel (Singarimbun and Effendi, 1981). Teknik analisis data eksplanatif mencakup

analisis hubungan sebab akibat suatu fenomena. Dengan demikian, peneliti akan menjelaskan apa yang bagaimana pembentukan pakta trilateral keamanan ‘AUKUS’ dipengaruhi oleh ancaman atau perilaku ofensif Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.

4. Tahapan Penelitian

- 1) Memahami ide utama dari penelitian.
- 2) Mencari informasi yang valid dan mengumpulkan bahan bacaan yang relevan dengan topik penelitian.
- 3) Membuat spesifikasi pada fokus penelitian dan mengelompokkan bahan yang akan digunakan dalam penelitian.
- 4) Menganalisis data dan fakta atas bahan penelitian yang telah diperoleh.
- 5) Membuat konklusi penelitian berdasarkan bahan dan data yang telah dianalisis sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Balance of Threat

Teori *balance of threat* merupakan salah satu teori yang berkembang dalam konsep *balancing*. *Balance of threat* pertama kali diperkenalkan oleh pemikir neorealis, Stephen M. Walt pada artikelnya '*Alliance Formation and the Balance of World Power*' pada jurnal '*International Security*' yang dipublikasikan pada tahun 1985 (Vasanthakumar, 2018). Kemudian teori tersebut dikembangkan dan dijelaskan secara lebih komprehensif pada bukunya '*The Origins of Alliances*' (1987). Dengan buku tersebut, Walt berusaha menganalisis penyebab negara-negara membentuk aliansi. Menurut Walt, banyak literatur-literatur mengenai aliansi yang terlalu fokus menganalisis distribusi beban dalam aliansi daripada menjelaskan mengapa aliansi itu sendiri terbentuk sejak awal.

Melalui buku tersebut, Walt memisahkan antara kekuatan (*power*) dan ancaman (*threat*) sebagai faktor pemicu suatu negara untuk membentuk aliansi dalam rangka melancarkan *balancing* atau *bandwagoning* terhadap negara lain. Walt mengklaim teori ini sebagai alternatif yang lebih baik daripada teori *balance of power* untuk menganalisis alasan negara untuk membentuk aliansi atau koalisi dalam melancarkan aksi *balancing*. Walt percaya bahwa negara-negara melakukan *balancing* dengan membuat aliansi atau bersekutu dikarenakan adanya ancaman yang dirasakan, bukan hanya akibat kekuatan negara lain (Walt, 1987), sebagaimana asumsi dasar teori *balance of power* yang dikembangkan oleh Kenneth Waltz dan para pemikir *balance of power* lainnya adalah kekuatan yang dimiliki suatu negara memicu negara lain untuk melakukan penyeimbangan kekuatan melawan negara tersebut. Walt sendiri pun sependapat dengan para pemikir *balance of power* pada argumen bahwa semakin besar

kekuatan atau sumber daya yang dimiliki suatu negara, semakin besar pula potensi kekuatan tersebut dapat ditunjukkan melalui tindakan agresif yang dapat dikerahkan terhadap negara lain (Walt, 1987). Akan tetapi, kekuatan dipercaya bukan satu-satunya faktor pemicu suatu negara bereaksi dengan melakukan *balancing*, sebagaimana tidak selamanya kekuatan tersebut ditunjukkan melalui tindakan agresif yang mengancam negara lain. Gagasan utama *balance of power* adalah negara-negara akan berusaha untuk mencapai distribusi kekuasaan atau kekuatan yang setara, salah satunya dengan membentuk sebuah aliansi atau berkoalisi untuk melakukan *balancing* melawan negara dengan kekuatan besar sebagai langkah untuk mencegah kekuatan besar tersebut mendominasi mereka (Andersen, 2018). Gagasan tersebut pun dilihat Walt tidak memiliki banyak bukti historis. Contohnya, selama Perang Dingin, Amerika Serikat dan sekutunya jauh lebih kuat secara ekonomi dan militer daripada Uni Soviet dan sekutunya. Pada saat itu Amerika Serikat dan sekutunya mengontrol sekitar 60 persen ekonomi global sementara Uni Soviet dan sekutunya hanya 25 persen (Walt, 2022). Dari peristiwa tersebut, dapat dilihat *balance of power* tidak teraplikasikan dengan banyaknya negara-negara yang memilih beraliansi dengan Amerika Serikat, yang memiliki kekuatan jauh lebih besar daripada Uni Soviet, dan membuat distribusi kekuatan justru lebih tidak merata. Hal tersebut terjadi karena Uni Soviet menunjukkan sikap yang lebih agresif dan mengancam daripada Amerika Serikat. Oleh karena itu, Walt dengan teori *balance of threat*-nya melihat bahwa negara-negara membentuk aliansi atau koalisi dalam melakukan *balancing* atau *bandwagoning* melawan negara lain adalah akibat adanya ancaman yang dirasakan, bukan hanya karena kekuatan yang dimiliki negara lain tersebut (Walt, 1987, 2022). Untuk mendukung argumennya tersebut, Walt pun membawa bukti historis dengan mengaplikasikan teori *balance of*

threat pada berbagai peristiwa pembentukan aliansi atau koalisi, khususnya pada masa Perang Dingin dan di kawasan Timur Tengah.

Pembentukan aliansi *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) merupakan salah satu contoh peristiwa yang menjustifikasi teori *balance of threat* pada masa Perang Dingin. NATO dibentuk oleh 12 negara independen untuk menciptakan keamanan kolektif melawan agresivitas dan ekspansi Uni Soviet (Bock and Henneberg, 2014; Doherty, 2022). Pasca Perang Dingin pun, banyak negara-negara Eropa yang memutuskan beraliansi dengan Amerika Serikat dengan bergabung dalam NATO sebagai bentuk antisipasi mereka terhadap agresivitas Rusia. Contoh terbaru yang juga dapat menjadi rujukan adalah ketika Finlandia dan Swedia mengajukan permohonan untuk bergabung dengan NATO setelah invasi Rusia terhadap Ukraina pada Februari 2022 (Doherty, 2022). Agresivitas Rusia membuat negara-negara tetangganya merasa tidak aman dan memilih untuk beraliansi dengan Amerika Serikat, walaupun dalam segi total kekuatan agregat, Amerika Serikat jauh mengungguli Rusia. Dengan bukti-bukti historis yang ada, Walt mengembangkan teori *balance of threat* dengan dasar pemikiran bahwa jika kekuatan merupakan pemicu utama sekumpulan negara membentuk aliansi, sebagaimana yang diklaim pemikir *balance of power*, maka seharusnya pada Perang Dingin negara-negara akan beraliansi dengan Uni Soviet untuk melakukan *balancing* melawan Amerika Serikat.

Aplikasi teori *balance of threat* pun dapat dilihat di kawasan Timur Tengah, salah satunya pada krisis nuklir Iran. Amerika Serikat dan Israel berkoalisi untuk *balancing* melawan Iran, yang kekuatan militer dan ekonominya jauh di bawah Amerika Serikat dan Israel (Bock and Henneberg, 2014). Kedua negara tersebut melihat proliferasi nuklir Iran sebagai ancaman bagi keamanan regional maupun keamanan global secara keseluruhan, sebagaimana yang dipaparkan Barack Obama, presiden

Amerika Serikat pada saat itu, “*Iran with nuclear weapons would pose a threat not only to the region, but also to the United States.*” (The Telegraph, 2011). Perdana Menteri Israel pada saat itu, Benjamin Netanyahu pun turut menyuarakan perasaan tidak amannya akan pengembangan nuklir Iran di Majelis Umum PBB pada September 2012 dan meminta PBB untuk bertindak dalam mencegah proliferasi nuklir tersebut (Martinez, 2012). Setelah melihat peristiwa-peristiwa pembentukan aliansi dan koalisi yang telah terjadi tersebut, Walt percaya bahwa negara-negara tidak membentuk aliansi untuk melakukan *balancing* hanya akibat kekuatan yang dimiliki negara lain, tetapi mereka melakukan *balancing* akibat adanya ancaman yang membahayakan keamanan mereka. Karena Walt berargumen bahwa negara-negara bereaksi untuk melakukan *balancing* akibat ancaman, Walt melihat pada empat indikator yang dapat menjadi sumber ancaman oleh suatu negara, yaitu kekuatan agregat, kedekatan geografis, kekuatan ofensif, dan intensi agresif.

Seperti yang telah dipaparkan, Walt memiliki pendapat yang sama dengan Waltz pada argumen bahwa kekuatan merupakan aspek penting yang dapat memicu negara lain untuk melakukan *balancing*, sebagaimana kekuatan suatu negara dapat berkontribusi pada potensi negara tersebut mengerahkan ancaman terhadap negara lain. Semakin besar total kekuatan agregat yang suatu negara miliki, semakin besar potensi ancaman yang dapat ia tunjukkan (Walt, 1987, 2022). Oleh karena itu, Walt menjadikan aspek kekuatan agregat sebagai salah satu indikator ancaman untuk mendukung teorinya. Kekuatan agregat mencakup keseluruhan total sumber daya suatu negara, baik itu dari segi militer, ekonomi hingga populasi (Walt, 1987; Vasanthakumar, 2018). Kekuatan militer tentu menjadi kontributor yang signifikan pada tingkatan ancaman oleh suatu negara; semakin kuat dan besar kekuatan militer suatu negara, semakin besar ancaman yang dapat ia ekspresikan terhadap negara lain. Kemudian pada aspek

ekonomi, besarnya ekonomi suatu negara dapat memberi akses terhadap negara tersebut untuk mengembangkan militernya, memperkaya inventaris persenjataan, hingga dapat memfasilitasi operasi-operasi militer yang dapat mengancam negara lain. Kekuatan ekonomi juga dapat digunakan negara untuk melakukan koersi terhadap negara lain dengan mengimplementasikan sanksi ekonomi, pembatasan perdagangan, hingga embargo, untuk mencapai kepentingan nasional negaranya (Michelino, 2022). Aspek demografis suatu negara pun dapat menjadi unsur kekuatan yang dapat berkontribusi menjadi ancaman. Dalam buku '*Global Demographic Change and Its Implications for Military Power*' (Libicki, Shatz and Taylor, 2011) dapat dipahami bagaimana demografis negara dapat mempengaruhi kekuatan militernya. Faktor demografis terhadap kekuatan militer suatu negara dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Dampak langsung yang dapat dilihat adalah negara yang memiliki jumlah populasi yang lebih besar dapat secara proporsional merekrut lebih banyak personel militer. Dampak tidak langsungnya adalah populasi dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya jika ekonomi meningkat, akses untuk meningkatkan pengeluaran militer pun lebih dapat dijangkau (Libicki, Shatz and Taylor, 2011).

Dengan penjelasan tersebut dapat dilihat bagaimana total kekuatan agregat berkontribusi pada tingkatan ancaman yang dikerahkan sebuah negara. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa alasan mengapa kekuatan agregat tidak dapat dijadikan satu-satunya faktor ancaman adalah karena kekuatan tidak selamanya kekuatan tersebut ditunjukkan dengan sikap dan tindakan agresif yang dapat mengancam negara lain, kekuatan tersebut baru akan menjadi ancaman ketika ditunjukkan melalui tindakan yang agresif dan represif. Dengan contoh aplikasi teori *balance of threat* di kawasan Timur Tengah yang telah dijelaskan, dapat dilihat juga bagaimana negara yang tidak

memiliki kekuatan relatif yang begitu besar, tetapi tetap mampu membawa ancaman terhadap negara lain, bahkan kepada negara yang pada aspek kekuatan agregat jauh lebih besar darinya, hingga membuat negara lain tersebut bereaksi dengan *balancing*. Oleh karena kekuatan agregat tidak selalu dilihat sebagai ancaman yang signifikan, teori *balance of threat* juga menambahkan aspek-aspek lain yang menjadi indikator sebuah ancaman, yaitu kedekatan geografis, kekuatan ofensif, dan intensi agresif (Walt, 1987; Watson, 2001).

Kedekatan geografis juga menjadi salah satu sumber ancaman pada teori Walt, sebagaimana suatu negara dengan kekuatan yang mengancam lebih dapat mengekspresikan dan memproyeksikan kekuatannya di negara atau wilayah sekitarnya (Walt, 1987). Hipotesis tersebut didasari dengan gagasan bahwa kondisi geografis mempengaruhi kemampuan suatu negara memproyeksikan kekuatannya, seperti yang terdapat dalam Walt: *Because the ability to project power declines with distance, states that are nearby pose greater threat than those that are far away* (Walt, 1987, hal. 23). Pandangan yang dapat mendukung keterkaitan kondisi geografis dan proyeksi kekuatan pun dapat dilihat dari tulisan '*Power, Proximity, and Democracy: Geopolitical Competition in the International System*' (2018) oleh Markowitz dan Fariss, yang melihat pengaruh kondisi geopolitik suatu wilayah terhadap peningkatan kapabilitas negara-negara dalam wilayah tersebut dalam memproyeksikan kekuatan. Negara-negara yang berada dalam lingkungan geopolitik yang kompetitif lebih terpacu untuk meningkatkan kemampuannya dalam memproyeksikan kekuatan, sedangkan negara-negara dalam lingkungan geopolitik yang kooperatif tidak cenderung bergantung pada kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan (Markowitz and Fariss, 2018). Dengan ini dapat digambarkan bahwa bila ada suatu negara yang memiliki kekuatan yang mengancam, tentu saja negara-negara yang berada disekitarnya merasa tidak aman dan

berinisiatif untuk bertahan hidup dengan ikut meningkatkan kemampuan proyeksi kekuatannya, baik melakukan *balancing* secara internal atau pun eksternal dengan membentuk aliansi.

Kekuatan ofensif, yang juga menjadi salah satu indikator ancaman pada teori *balance of threat*, merujuk pada kemampuan suatu negara untuk mengancam kedaulatan atau integritas teritorial negara lain (Walt, 1987). Bila kekuatan agregat mencakup keseluruhan total sumber daya, kekuatan ofensif secara spesifik merujuk pada kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan aksi ofensif terhadap negara lain. Negara dengan kemampuan ofensif yang besar, lebih mungkin untuk memprovokasi aliansi daripada mereka yang tidak atau kurang memiliki kekuatan ofensif (Walt, 1987). Kekuatan ofensif tersebut khususnya dapat dilihat dari bagaimana pasukan militer suatu negara dirancang untuk menaklukkan negara lain, dan bagaimana pasukan militernya difasilitasi dengan berbagai persenjataan ofensif untuk merugikan atau membahayakan negara lain (Walt, 2022). Walt melihat dampak langsung yang ditimbulkan oleh kemampuan ofensif dapat menciptakan insentif yang kuat bagi negara lain untuk segera melakukan *balancing* (Walt, 1987), salah satunya dengan membentuk aliansi.

Indikator terakhir yang menjadi ancaman di bawah teori Walt adalah intensi agresif; dengan hipotesis bahwa negara yang terlihat agresif akan lebih memicu negara lain untuk melakukan *balancing* melawannya (Walt, 1987). Dapat dilihat pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II di mana Jerman Nazi menghadapi koalisi oposisi yang sangat besar akibat menggabungkan kekuatan dengan ambisi yang sangat agresif dan berbahaya (Walt, 1987). Walt juga menambahkan bahwa negara yang memiliki kekuatan yang cenderung tidak terlalu besar tidak menutup kemungkinan untuk dapat memicu negara lain untuk melakukan *balancing* jika negara tersebut terlihat memiliki

intensi atau perilaku yang agresif. Contoh kasus yang dapat kita lihat adalah ketika Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris membentuk koalisi melawan Libya pada tahun 2011. Dalam aspek kekuatan agregat, Libya jauh di bawah ketiga negara tersebut, tetapi memiliki intensi yang sangat agresif di bawah kepemimpinan Muammar Gaddafi (BBC, 2011). Walt juga melihat intensi agresif dapat ditemukan di negara yang memiliki intensi revisionis yang tinggi dan ingin mengubah *status quo power* (Walt, 2022). Negara revisionis dilihat Walt dapat lebih berbahaya daripada negara yang sudah puas dengan *status quo* dan tidak berusaha untuk menggantinya.

Perdebatan atas teori ini pun eksis dalam kalangan pemikir neorealisme. Walaupun teori ini dikembangkan oleh pemikir neorealis, tetapi teori ini sendiri tidak sepenuhnya konsisten dengan paradigma neorealisme, sebagaimana teori ini menganalisis intensi suatu negara, sementara neorealisme sendiri mengasumsikan bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, intensi negara tidak akan pernah bisa dipastikan (Waltz, 1979; Mearsheimer, 2001). Karena intensi negara lain yang tidak pernah bisa dipastikan tersebut, negara harus terus memikirkan skenario terburuk yang dapat terjadi dan terus meningkatkan kekuatannya demi keberlangsungan hidupnya (Waltz, 1979; Mearsheimer, 2001). Walt pun menyadari bahwa adanya sedikit perbedaan dengan neorealisme pada aspek intensi dalam teorinya, seperti yang dikutip dari Walt:

Kenneth Waltz was my teacher and the founder of modern neorealism, and he understood that what I was doing was a little different than what he had pioneered. The big difference is the intention. This is also where I disagree with John Mearsheimer, and scholars like Sebastian Rosato, who basically argue that you cannot know intentions, therefore you have to assume the worst all the time. And I believe they are right that you cannot know intentions with 100 percent certainty, but you can make intelligent judgements about intentions. [...] that is clearly a difference between me and the most pure neorealists. (Walt, 2022).

Dapat dilihat Walt juga sependapat dengan pemikir neorealisme lain seperti Kenneth Waltz dan John Mearsheimer bahwa intensi sebuah negara tidak akan pernah bisa diketahui secara pasti, akan tetapi intensi suatu negara tetap dapat dinilai. Pemisahan antara kekuatan (*power*) dan ancaman (*threat*) yang berusaha dilakukan Walt ini juga yang membuat *balance of threat* sedikit berbeda dari neorealisme yang “murni”. Mearsheimer pada bukunya ‘*The Tragedy of Great Power*’ (2001) berargumen bahwa ketika sebuah negara menyurvei lingkungannya untuk menentukan negara mana yang menimbulkan ancaman bagi kelangsungan hidupnya, negara akan berfokus pada kemampuan atau kekuatan ofensif suatu negara, bukan dari intensi negara tersebut. Mearsheimer percaya bahwa karena intensi tidak dapat diukur, sementara kekuatan ofensif dapat diukur, maka dari itu kekuatan lah yang menentukan apakah suatu negara tersebut merupakan ancaman yang serius atau tidak (Mearsheimer, 2001). Dengan tidak melihat intensi, neorealis seperti Waltz dan Mearsheimer menganggap kekuatan berarti ancaman. Oleh sebab itu, Waltz dan Mearsheimer berpendapat bahwa negara melakukan *balancing* terhadap kemampuan atau kekuatan, bukan intensi, sebagaimana yang ditekankan pada teori *balance of threat*.

Terlepas dari adanya perdebatan mengenai teori *balance of threat*, Walt telah berkontribusi memodifikasi pemikiran neorealisme dengan teori yang tidak menggeneralisasi konsep-konsep yang ada, contohnya dengan menyediakan perbedaan mengenai kekuatan dan ancaman, hingga *balancing* dan *bandwagoning*. Vasanthakumar juga melihat penyimpangan kecil *balance of threat* dari neorealisme hanya kontekstual, tidak hingga aspek teoritis (Vasanthakumar, 2018). Salah satu capaian yang penting dari teori ini juga adalah Walt menyusun teorinya tersebut dengan menyediakan bukti empiris, dengan mengaplikasikan teorinya di berbagai peristiwa

dunia, baik dari peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau hingga peristiwa di sistem politik kontemporer yang terjadi saat ini.

B. Regional Security Complex

Konsep kompleks keamanan kawasan atau *Regional Security Complex* (RSC) berkembang dalam Mazhab Kopenhagen atau *Copenhagen School* yang fokus pada studi keamanan dalam paradigma konstruktivisme. Konsep RSC pertama kali dikembangkan oleh dalam pelopor Mazhab Kopenhagen dalam hubungan internasional, Barry Buzan dalam bukunya '*People, States, and Fear*' (Buzan, 1983). Konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jeep de Wilde dalam karya '*Security: A new framework for Analysis*' (1998), hingga dikembangkan lagi menjadi *grand theory* atau teori besar yang secara komprehensif diurai dalam buku '*Regions and Powers: The Structure of International Security*' (2003) oleh Buzan dan Wæver. Secara garis besar, kompleks keamanan atau *security complex* didefinisikan sebagai sekelompok negara yang masalah keamanannya terhubung secara cukup erat sehingga keamanan nasional mereka tidak dapat dianggap terpisah antara satu sama lain (Buzan, 1983).

Teori RSC ini menggunakan perpaduan antara pendekatan materialis (neorealis) dan konstruktivis dalam hubungan internasional. Di sisi materialisme-nya, teori RSC menggunakan ide-ide teritorialitas dan distribusi kekuasaan (*distribution of power*) yang dekat dengan pendekatan neorealisme (Buzan and Wæver, 2003). Akan tetapi teori ini juga memiliki kontradiksi dengan neorealisme sebagaimana neorealisme terlalu berfokus pada struktur tingkat global, sementara RSC hadir untuk menitikberatkan analisis keamanan pada tingkat regional. Karena adanya kontradiksi tersebut, dapat dikatakan teori ini lebih kuat dalam sisi konstruktivis-nya, sebagaimana pembentukan dan operasi RSC dilihat pada pola hubungan yang terjadi di antara negara-negara dalam

kawasan, yang membuat dinamika regional bergantung pada tindakan, perilaku, dan interpretasi para aktor dalam kawasan tersebut (Buzan and Wæver, 2003).

Teori ini dikembangkan atas dasar pemikiran bahwa untuk memahami dinamika keamanan global, terutama pasca Perang Dingin, diperlukan fokus analisis yang lebih besar pada tingkat regional (Williams, 2008; Soltani, Naji and Amiri, 2015). Menurut Buzan dan Wæver, sejarah RSC terbagi dalam tiga tahap, yang terdiri dari: 1) era modern yang berlangsung dari tahun 1500 hingga 1945; 2) Perang Dingin dan dekolonisasi dari tahun 1945 hingga 1989; dan 3) periode pasca Perang Dingin sejak tahun yang mulai sejak tahun 1990 (Buzan and Wæver, 2003).

Pada era modern (1500-1945), telah terdapat semacam keamanan regional, tetapi belum didominasi atau ditentukan oleh aktor-aktor lokal dalam kompleks keamanan yang ada, keamanan regional ditentukan oleh persaingan global antara kekuatan-kekuatan besar seperti negara-negara Eropa, dan juga Amerika Serikat dan Jepang yang muncul pada akhir era modern (Buzan and Wæver, 2003). Kemudian pada tahap kedua, yaitu era Perang Dingin dan dekolonisasi terdapat kontradiksi. Di satu sisi, dekolonisasi mendorong mundur kekuatan besar atau kekuatan kekaisaran, menciptakan puluhan negara-negara baru yang berdaulat, yang pada akhirnya memberi ruang untuk dinamika keamanan regional dioperasikan oleh negara-negara baru tersebut, contohnya seperti di Asia Selatan, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan sebagian besar Afrika. Di sisi lain, persaingan bipolar antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menembus ke sebagian besar wilayah yang baru merdeka (Buzan and Wæver, 2003), menjadikan kompleks keamanan kawasan pun belum sepenuhnya dioperasikan oleh negara-negara lokal, tetapi juga terdapat pengaruh eksternal yang cukup besar. Tingkat keamanan kawasan dalam politik internasional dapat dilihat paling mencolok pada tahap ketiga, pasca Perang Dingin. Berakhirnya bipolaritas Amerika Serikat dan Uni Soviet memberikan kekuatan dan

pengaruh penuh kepada kekuatan-kekuatan internal kompleks untuk bermanuver dalam kawasannya sendiri (Buzan and Wæver, 2003).

Walaupun masih terdapat bipolaritas, sejak era dekolonisasi tingkat keamanan regional jauh menjadi lebih otonom daripada sebelumnya. Kemudian analisis tingkat regional jauh lebih menonjol dan berkembang lagi pasca Perang Dingin, menjadikannya sangat penting dan signifikan untuk memahami dinamika keamanan global. Teori RSC pun muncul untuk mengatasi absensi atau kurangnya teori yang dapat digunakan untuk menganalisa keamanan dalam skala regional tersebut (Williams, 2008). Ide utama dari teori RSC adalah akibat sebagian besar ancaman lebih mudah dikerahkan dalam jarak dekat daripada jarak jauh, interdependensi keamanan umumnya terpola dalam kluster berbasis regional atau yang disebut Buzan "*security complexes*" atau kompleks keamanan. Dengan demikian, proses sekuritisasi dan tingkat keterkaitan keamanan lebih intens terjadi antara aktor di dalam kompleks keamanan tersebut daripada antara aktor internal dalam kompleks dan aktor eksternal di luarnya (Buzan and Wæver, 2003). Ide tersebut pun juga didukung dengan argumen Friedberg yang menyatakan bahwa secara historis, sebagian besar negara-negara sangat mengkhawatirkan kekuatan dan intensi dari negara-negara tetangganya (Friedberg, 1993).

Seperti yang telah dijelaskan, kompleks keamanan kawasan atau RSC didefinisikan Buzan sebagai sekelompok negara yang isu keamanan utamanya saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan antara satu sama lain. Aspek-aspek yang menyatukan suatu kompleks keamanan pun tidak hanya geografis, tetapi juga politik, strategis, sejarah, ekonomi, hingga budaya (Buzan, 1983). Untuk mendukung teori RSC-nya tersebut, Buzan mengambil isu keamanan di Asia Selatan, Kashmir, sebagai salah satu bukti empirisnya. Inti dari kompleks keamanan kawasan tersebut berputar pada persaingan antara India dan Pakistan, dua negara besar dalam kawasan yang rasa

tidak amannya terhadap satu sama lain terjalin begitu kuat sehingga arah kebijakan keamanan nasional mereka, khususnya dalam hal keamanan politik dan militer, tidak dapat terlepas kaitannya antara satu sama lain (Buzan, 1983). Kedua negara tersebut telah berselisih sejak 1947, mulai dari konflik sengketa wilayah di Kashmir hingga isu terorisme. Negara-negara yang secara kekuatan agregat kurang kuat di Asia Selatan pun terikut dalam kompleksitas keamanan kedua negara tersebut akibat faktor kedekatan geografis, seperti Bangladesh, Bhutan, Nepal, dan Sri Lanka (Buzan, 1983; Zahid, 2022).

Tidak hanya “mengunci” negara-negara kecil dalam RSC akibat faktor kedekatan geografis, rivalitas negara-negara yang terjadi dalam RSC dapat menarik kekuatan eksternal, khususnya negara adidaya, untuk ikut terlibat dan menembus kompleks keamanan tersebut. Perlu digarisbawahi bahwa RSC tidak menutup kemungkinan adanya kekuatan eksternal yang dapat menembus suatu kawasan dan terlibat dalam kompleksitas keamanan di kawasan tersebut. Mekanisme yang menghubungkan kekuatan global dengan dinamika regional dalam RSC disebut Buzan dan Wæver adalah mekanisme penetrasi (Buzan and Wæver, 2003). Penetrasi terjadi ketika kekuatan eksternal melakukan keberpihakan keamanan dengan negara dalam RSC. Contoh yang dapat dilihat adalah ketika negara-negara adidaya melakukan penetrasi di kompleks Asia Selatan, khususnya pada Perang Dingin. Rivalitas antara India dan Pakistan membuka kesempatan dan kebutuhan akan negara dengan kekuatan besar untuk menembus wilayah tersebut. Untuk mencapai keseimbangan kekuatan yang dibutuhkan dalam rivalitas tersebut secara alami mendorong kedua negara untuk meminta bantuan dari aktor eksternal, dan oleh karena itu pola rivalitas lokal dalam suatu kawasan menjadi terkait dengan pola rivalitas global (Buzan and Wæver, 2003).

Dapat dilihat pada masa Perang Dingin, India terhubung dengan Uni Soviet, sedangkan Pakistan terhubung dengan Amerika Serikat dan China (Buzan and Wæver, 2003).

Buzan dan Wæver menyatakan salah satu tujuan teori RSC adalah menolak kecenderungan untuk terlalu menekankan peran negara-negara besar, dan untuk memastikan bahwa faktor-faktor lokal dalam suatu kawasan diberi bobot yang sesuai dalam analisis keamanan. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa walaupun RSC memberikan penekanan pada aktor-aktor regional dan dinamika keamanan yang terjadi pada kawasan, aktor global pun tetap tidak diabaikan sebagaimana aktor global pun dapat terlibat dan mempengaruhi dinamika keamanan dalam RSC. Mengutip dari Buzan dan Wæver: *“The standard form for an RSC is a pattern of rivalry, balance-of-power, and alliance patterns among the main powers within the region: to this pattern can then be added the effects of penetrating external powers”* (Buzan and Wæver, 2003, hal 47).

Untuk melihat *Security Complex* secara komprehensif, terdapat empat tingkat analisis pada teori ini yaitu (Buzan and Wæver, 2003; Zahid, 2022):

1. Level domestik. Tingkat domestik menganalisis kebijakan keamanan masing-masing negara dalam kawasan dan aktor dari negara-negara tersebut terhadap negara lain;
2. Level regional. Tingkat regional menganalisis dinamika hubungan dalam kawasan, baik hubungan tersebut berupa persahabatan (*amity*) atau permusuhan (*enmity*). Analisis ini akan mengarahkan pada pembentukan RSC;
3. Level intra-regional. Pada tingkat ini menjelaskan bagaimana pola hubungan antar wilayah atau kawasan dan bagaimana pola tersebut dapat memengaruhi RSC;

4. Level global. Analisis tingkat global melihat peran dan kepentingan kekuatan besar dan negara adidaya di berbagai wilayah dan pengaruhnya terhadap RSC.

Secara keseluruhan, keempat tingkatan analisis tersebut disebut Buzan sebagai *security constellations* atau konstelasi keamanan yang merupakan konsep yang lebih luas daripada RSC, sebagaimana konstelasi keamanan ini melihat dinamika keamanan dari setiap tingkatan (Buzan, Waever and Wild, 1998; Buzan and Wæver, 2003). Untuk teori RSC sendiri berpusat pada tingkat regional. Teori RSC menegaskan bahwa analisis tingkat regional akan selalu operatif, dan terkadang dominan daripada tingkat lainnya dalam konstelasi keamanan (Buzan and Wæver, 2003). Walaupun tingkat regional tidak mendominasi, tetapi tingkat regional selalu berperan secara signifikan, dan tidak dapat dikeluarkan dari analisis keamanan.

Selain melihat pada berbagai aktor dan tingkatan analisis keamanan, konsep dari *security complex* pun juga melihat pola keamanan yang membentuk RSC itu sendiri. Buzan menekankan RSC terbentuk oleh distribusi kekuasaan (*distribution of power*) dan hubungan yang terjadi dalam kawasan tersebut, baik hubungan dalam bentuk '*amity*' atau persahabatan, atau dalam bentuk '*enmity*' atau permusuhan (Buzan, Waever and Wild, 1998; Buzan and Wæver, 2003). Pada bentuk *enmity* atau permusuhan, negara-negara dalam RSC melihat satu sama lain sebagai potensi ancaman. Saling keterkaitan keamanan nasional di antara mereka muncul akibat ketakutan antara satu sama lain, persaingan, dan persepsi yang sama akan ancaman yang mungkin dikerahkan oleh negara lain terhadapnya (Jervis dikutip dalam Buzan, Waever and Wild, 1998). Sedangkan pada bentuk *amity* atau persahabatan, negara-negara tidak lagi melihat adanya potensi ancaman, dan tidak mempersiapkan diri untuk menggunakan kekerasan terhadap satu sama lain (Buzan, Waever and Wild, 1998). Negara-negara RSC yang memiliki hubungan baik akan bekerja sama untuk mencapai

keamanan secara kolektif atau bersama-sama. Baik pola hubungan *amity* atau *enmity* yang terjadi dalam suatu RSC pun dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sejarah, budaya, agama, hingga geografis (Buzan and Wæver, 2003).

C. Penelitian Terdahulu

Literatur-literatur mengenai pakta AUKUS yang secara khusus melihat pembentukan AUKUS sebagai strategi Amerika Serikat, Inggris, dan Australia untuk menjaga kepentingannya dalam menghadapi asertifitas Tiongkok banyak dianalisis dengan konsep *balancing* dan teori-teori yang berkembang dalam konsep tersebut, khususnya dengan teori *balance of power*. Tidak hanya digunakan pada jurnal penelitian, penggunaan kata atau konsep *balance of power* ini juga banyak digunakan dalam artikel berita, artikel opini, dan bentuk literatur lainnya. Berbeda dengan literatur yang dibangun dengan teori *balance of power* yang mengasumsikan bahwa AUKUS dibentuk akibat peningkatan kekuatan Tiongkok di Indo-Pasifik, penelitian ini akan fokus menganalisis AUKUS dengan teori *balance of threat* dengan tidak hanya melihat kekuatan sebagai pemicu *balancing* oleh Amerika Serikat, tetapi juga melihat indikator-indikator ancaman lainnya yang memicu Amerika Serikat untuk memimpin pembentukan AUKUS. Untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya terkait AUKUS yang menggunakan konsep *balancing*, perlu adanya penjabaran singkat atas beberapa literatur yang ada.

Salah satu penelitian terkait AUKUS dapat dilihat pada tulisan *policy outlook* oleh Muhammed Lutfi Türkcan (2022) yang menganalisis AUKUS melalui perspektif teori *balance of power* dan melihat implikasinya terhadap tatanan regional di Indo-Pasifik. Türkcan melihat pembentukan AUKUS dapat dianggap sebagai upaya *balance of power* atau penyeimbangan kekuatan Amerika Serikat terhadap kekuatan dan pengaruh Tiongkok yang dinilai berpotensi untuk menjadi dominan di kawasan Indo-

Pasifik (Türkcan, 2022). Aksi penyeimbangan kekuatan tersebut pun dilakukan dengan metode *external balancing* berupa pembentukan koalisi pertahanan bersama Australia dan Inggris yang juga melihat Tiongkok sebagai ancaman terhadap kepentingannya (Türkcan, 2022). Argumen penting pada penelitian oleh Türkcan ini adalah pembentukan AUKUS mengembalikan politik *balance of power* dalam kawasan, sebagaimana Türkcan melihat bahwa selama ini negara-negara Indo-Pasifik tidak aktif dalam melancarkan aksi *balancing* melawan kebangkitan Tiongkok, tetapi justru melakukan *bandwagoning* dengan Tiongkok terlepas dari meningkatnya kekuatan dan agresivitasnya di kawasan Indo-Pasifik (Türkcan, 2022).

Selain itu, terkait dengan implikasinya terhadap tatanan regional Indo-Pasifik, Türkcan berpendapat bahwa ketika proyek kapal selam AUKUS rampung, kapabilitas maritim tersebut dapat menjadi *deterrent* yang signifikan terhadap aktivitas asertif Tiongkok di Laut Cina Selatan (Türkcan, 2022). Di waktu yang bersamaan, respon yang variatif terhadap AUKUS dari beberapa negara dalam kawasan, tidak terkecuali respon pesimistis yang beberapa di antaranya datang dari negara seperti Indonesia dan Malaysia, menjadikan Amerika Serikat juga mempunyai tantangan yang serius untuk memperoleh dukungan dari negara-negara Indo-Pasifik untuk menyukseskan AUKUS (Türkcan, 2022). Menurut Türkcan, Amerika Serikat perlu meyakinkan negara-negara dalam kawasan dengan berbagai inisiatif yang substantif agar dapat mencapai tatanan kawasan yang disebut Türkcan "*U.S-led regional order*" (Türkcan, 2022).

Selain dengan teori *balance of power*, beberapa penelitian mengenai AUKUS juga dianalisis dengan teori *offshore balancing* sebagaimana Amerika Serikat dan Inggris dilihat menggunakan Australia sebagai *balancer* di kawasan Indo-Pasifik. Penelitian tersebut salah satunya dapat dilihat pada penelitian oleh Fatih Bazeyit (2022) yang menganalisis AUKUS melalui lensa realisme neoklasik dan teori *offshore*

balancing. Melalui penelitian tersebut, Bazeyit menganalisis masing-masing motif dari Amerika Serikat, Australia dan Inggris dalam membentuk AUKUS dengan melihat persepsi para elit negara-negara tersebut sebagaimana paradigma realisme neoklasik menjadikan persepsi para elit, atau pemerintah, sebagai pengaruh penting dalam penentuan arah kebijakan luar negeri suatu negara (Bazeyit, 2022). Persepsi ancaman dan peluang para elit ketiga negara AUKUS menjadi elemen penting dalam penelitian Bazeyit. Bazeyit mengemukakan akibat adanya kepentingan Amerika Serikat yang menjadi jauh lebih signifikan di kawasan Indo-Pasifik di bawah pemerintahan Biden, dan kepentingan Inggris di kawasan Indo-Pasifik yang juga menjadi lebih kuat pasca Brexit, serta berkembangnya persepsi elit Australia bahwa Tiongkok adalah sebuah ancaman keamanan nasional, AUKUS kemudian berhasil dibentuk sebagai pakta keamanan baru di kawasan tersebut (Bazeyit, 2022). Terkait dengan penggunaan perspektif *offshore balancing*, dapat dilihat pada salah satu poin utama pada penelitian Bazeyit adalah bahwa AUKUS merupakan bagian dari strategi *offshore balancing* oleh Amerika Serikat dan Inggris untuk menjaga kepentingannya di kawasan Indo-Pasifik dengan menggunakan Australia sebagai *balancer* di kawasan tersebut (Bazeyit, 2022).

Sejalan dengan Bazeyit, Novita (2022) juga melihat Australia memainkan peran sebagai *offshore balancer* untuk Amerika Serikat dalam upayanya untuk menyeimbangkan kekuatan dengan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, yang di mana upaya tersebut menjadi salah satu agenda prioritas dalam daftar kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Biden (Novita, 2022). Selain itu, selaras dengan Türkcan (2022) dan penelitian AUKUS lainnya yang menggunakan teori *balance of power*, Novita juga berpendapat bahwa AUKUS mempresentasikan praktik *balance of power* oleh Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik dengan membentuk aliansi dengan dua sekutu terpentingnya, Australia dan Inggris, untuk melawan

kebangkitan kekuatan dan pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut (Novita, 2022). Berbeda dengan dua penelitian yang dipaparkan sebelumnya, yang menyediakan analisis kepentingan dan persepsi ketiga negara anggota AUKUS, Novita sendiri fokus menganalisis kepentingan strategis Amerika Serikat yang tersemat pada AUKUS. Novita berargumen bahwa pendirian pakta AUKUS dapat dilihat sebagai strategi Amerika Serikat untuk merebut kembali kekuasaan di Indo-Pasifik dan melemahkan pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut (Novita, 2022). Dengan AUKUS, Novita percaya Amerika Serikat akan memiliki lebih banyak instrumen untuk mewujudkan kepentingan strategisnya di kawasan Indo-Pasifik (Novita, 2022).

Setelah memahami berbagai literatur yang ada terkait AUKUS dengan konsep *balancing*, penelitian ini akan menggunakan teori *balancing* yang berbeda, yaitu dengan menggunakan teori *balance of threat* sebagai pondasi penelitian. Penelitian ini pun fokus menganalisis faktor-faktor ancaman Tiongkok yang mengganggu kepentingan Amerika Serikat hingga berinisiatif membentuk AUKUS. Walaupun menggunakan teori *balancing* yang berbeda, perlu digarisbawahi bahwa penelitian ini tidak disusun untuk menyangkal penelitian yang dibangun dengan teori-teori *balancing* lainnya, sebagaimana pembentukan AUKUS benar dapat dikonsiderasikan sebagai bentuk *balance of power* atau *offshore balancing* Amerika Serikat terhadap Tiongkok. Akan tetapi, dengan teori *balance of threat* yang digunakan pada penelitian ini dapat menjadi pelengkap argumen dari kedua teori tersebut, sebagaimana teori *balance of threat* ini fokus menjelaskan bagaimana Amerika Serikat terpicu untuk melakukan *balancing* dengan membentuk aliansi atau kerja sama pertahanan baru tidak hanya atas dasar kekuatan Tiongkok yang meningkat, tetapi juga bagaimana kekuatan tersebut ditunjukkan melalui tindakan yang dinilai mengancam keamanan dan kepentingan AS dan sekutunya. Faktor-faktor ancaman Tiongkok tersebut dianalisis dengan melihat

empat indikator ancaman sesuai dengan teori *balance of power* yang dikembangkan Walt, mulai dari total kekuatan agregat Tiongkok, kekuatan ofensif dan intensi agresif Tiongkok, hingga kedekatan geografis. Dalam penelitian ini juga, akan dianalisis bagaimana AUKUS merespon beberapa indikator ancaman Tiongkok tersebut.

Di samping menganalisis faktor-faktor ancaman yang menjadi pemicu Amerika Serikat melakukan *balance of threat* terhadap Tiongkok melalui AUKUS, penelitian ini juga akan menganalisis dampak eksistensi AUKUS terhadap dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Salah satu penelitian yang fokus menganalisis implikasi AUKUS terhadap dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik dapat dilihat pada artikel “*AUKUS: The Changing Dynamic and Its Regional Implications*” oleh M. Cheng (2022). Melalui penelitiannya tersebut Cheng membagikan pandangan pesimistis terhadap AUKUS yang memiliki tujuan untuk membawa perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan di kawasan Indo-Pasifik (Cheng, 2022). Pandangannya tersebut disertai dengan berbagai argumen bahwa AUKUS dapat membawa berbagai dampak negatif terhadap stabilitas keamanan Indo-Pasifik, seperti memprovokasi perlombaan senjata hingga membuka potensi Australia dalam mengembangkan senjata nuklir, walaupun dalam pakta AUKUS senjata nuklir bukan bagian dari pakta keamanan tersebut (Cheng, 2022).

Cheng juga menyediakan tiga implikasi negatif AUKUS secara spesifik terhadap kawasan Asia Tenggara. Pertama, Cheng melihat ASEAN, sebagai organisasi regional di kawasan tersebut, akan dihadapkan dengan situasi *security dilemma*, di mana negara-negara ASEAN akan berambisi untuk meningkatkan kapabilitas militer mereka untuk menjamin keamanan mereka dari kompetisi dua negara dengan kekuatan besar di kawasan mereka (Cheng, 2022). AUKUS juga dinilai merusak upaya ASEAN untuk melestarikan kawasan Asia Tenggara sebagai ‘*nuclear-free area*’ atau kawasan

bebas nuklir. Kedua, AUKUS dianggap dapat meningkatkan persaingan sengit antara kekuatan-kekuatan besar di wilayah tersebut, yang pada akhirnya memperburuk risiko perlombaan senjata dan melemahkan stabilitas kawasan (Cheng, 2022). Cheng potensi peningkatan persaingan antara kekuatan-kekuatan besar tersebut dapat melemahkan sentralitas ASEAN di kawasan tersebut (Cheng, 2022). Ketiga, Cheng melihat AUKUS dapat memecah belah ASEAN dan menghambat proses integrasi politik dan keamannya, sebagaimana terdapat perbedaan respon anggota ASEAN terhadap AUKUS (Cheng, 2022).

Berbeda dengan pandangan Cheng, penelitian ini akan mencoba menganalisis dampak eksistensi AUKUS terhadap dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik dengan pendekatan yang lebih netral dan luas. Walaupun terdapat beberapa kesamaan pendapat antara penelitian oleh Cheng dan penelitian ini bahwa AUKUS dapat membawa implikasi negatif terhadap stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik, tetapi penelitian ini tidak sepenuhnya pesimis terhadap AUKUS dengan melihat adanya peluang tercapainya distribusi kekuatan yang lebih seimbang. Fokus dari penelitian ini juga melihat bagaimana kebijakan keamanan negara-negara Indo-Pasifik pasca pembentukan AUKUS berkaitan antara satu sama lain hingga mempengaruhi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik dengan menggunakan teori *regional security complex*.